



BAGIAN PKORB
BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI

TRIWULAN 3

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, ridho dan hidayah-Nya kami masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI sekaligus penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Reformasi Birokrasi (RB) Triwulan III Tahun 2024 dengan lancar dan sukses. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan RB di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap pelaksanaan RB dari Triwulan III Tahun 2024, termasuk capaian program dan permasalahan yang dihadapi sehingga dapat menjadi bahan acuan dan *feed back* untuk mendukung pelaksanaan evaluasi internal dan evaluasi eksternal, serta penyusunan rencana kerja pelaksanaan RB di tahap berikutnya.

Kepada Tim RB Tahun 2024, kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas kerja kerasnya dalam pelaksanaan RB Sekretariat Jenderal DPR RI Triwulan III Tahun 2024. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan RB Triwulan III Tahun 2024 ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran yang membangun dari semua pihak.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memenuhi harapan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan menjadi bahan perbaikan pelaksanaan RB ke depannya.

Jakarta, Oktober 2024

Wakil Ketua Tim Reformasi Birokrasi 2024

Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional, Reformasi Birokrasi (RB) menjadi ujung tombak terciptanya *World Class Bureaucracy* yang tertuang sebagai visi dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Memasuki periode terakhir dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi, pelaksanaan RB pada periode 2020-2025 diharapkan mampu melakukan percepatan sehingga visi tersebut dapat terealisasi.

Upaya percepatan perlu dilakukan secara komprehensif sehingga *outcome* yang dihasilkan dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait. Oleh karena itu, upaya percepatan perlu disertai dengan monitoring dan evaluasi berkala sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dengan begitu, upaya percepatan pelaksanaan RB dapat berdampak positif terhadap pencapaian sasaran Pembangunan Nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan RB, Sekretariat Jenderal DPR RI melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan hasil pencapaian RB di tingkat instansional, atau disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan pelaksanaan RB didesain secara tepat, dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta berdampak positif pada hasil pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh para *stakeholder*.

Sekretariat Jenderal DPR RI memahami bahwa monitoring dan evaluasi RB merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari siklus pengelolaan RB. Kegiatan yang dilaksanakan per triwulan ini akan menjadi pelengkap dari perencanaan dan implementasi kebijakan RB yang akan mendorong proses perbaikan berkelanjutan. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan RB di triwulan berikutnya, serta peningkatan capaian pelaksanaan kegiatan RB Sekretariat Jenderal DPR RI ke depannya.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1178 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1124/SEKJEN/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI 2020 – 2024.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RB Triwulan III Sekretariat Jenderal DPR RI adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan hasil pencapaian RB Sekretariat Jenderal DPR RI;
2. Memonitor pelaksanaan rencana aksi Triwulan III Tahun 2024 pada setiap indikator kegiatan utama RB di Sekretariat Jenderal DPR RI;
3. Memberikan saran perbaikan dan penyempurnaan untuk meningkatkan pencapaian RB Sekretariat Jenderal DPR RI;
4. Menentukan upaya pemecahan masalah atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan RB di Sekretariat Jenderal DPR RI guna meningkatkan hasil pencapaian RB Sekretariat Jenderal DPR RI.

LAPORAN PELAKSANAAN RB GENERAL TRIWULAN III TAHUN 2024 SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

RB General berfokus pada penyelesaian isu hulu, yaitu perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah. Pelaksanaan RB General diharapkan agar fokus dan percepatan sasaran strategis RB dapat tercapai secara keseluruhan, sesuai dengan sasaran *Road Map* RB 2020-2024. Pada tingkatan instansional/level mikro, pelaksanaan RB mencakup implementasi kebijakan maupun program RB yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso, serta program inovasi RB yang diperlukan untuk mengakselerasi capaian tujuan dan sasaran strategis RB. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur tentang penajaman *Road Map* RB Nasional, penilaian RB kini terdiri dari pelaksanaan RB General dan RB Tematik. RB General dilakukan atas 17 (tujuh belas) Kegiatan Utama dengan 22 (dua puluh dua) Indikator Kegiatan Utama. Sedangkan RB Tematik terdiri atas 5 (lima) tema yang mendukung tujuan Pembangunan Nasional. Berikut ini adalah monitoring dan evaluasi atas rencana aksi RB General Sekretariat Jenderal DPR RI beserta capaiannya pada Triwulan III Tahun 2024.

A. PROGRES CAPAIAN RENCANA AKSI RB GENERAL DAN INDIKATOR RB GENERAL TRIWULAN III TAHUN 2024

1. Penyederhanaan Birokrasi: Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi

<i>Leading Sector</i>	<i>Capaian 2022</i>	<i>Capaian 2023</i>	<i>Target 2024</i>	<i>Penanggung Jawab</i>
Kementerian PANRB	4	26,98	26,98	Biro Perencanaan dan Organisasi

<i>Rencana Aksi</i>	<i>Indikator Output</i>	<i>Target Penyelesaian</i>				<i>Jumlah Anggaran</i>	<i>Penjelasan Capaian</i>
		<i>TW 1</i>	<i>TW 2</i>	<i>TW 3</i>	<i>TW 4</i>		
Penyusunan kajian penyederhanaan birokrasi	Jumlah kajian penyederhanaan birokrasi	-	-	-	1	Rp. 350.039.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Penyampaian usulan penyederhanaan birokrasi	Jumlah surat usulan penyederhanaan birokrasi	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Penetapan struktur organisasi berdasarkan surat persetujuan penataan organisasi	Jumlah Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Organisasi dan Tata Kerja	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Pada indikator kegiatan Penyederhanaan Birokrasi, pelaksanaan rencana aksi dijadwalkan pada Triwulan IV. Untuk itu, tidak terdapat capaian pada Triwulan III.

2. Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN: Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN

<i>Leading Sector</i>	<i>Capaian 2022</i>	<i>Capaian 2023</i>	<i>Target 2024</i>	<i>Penanggung Jawab</i>
Kementerian PANRB	-	3	4	Biro Perencanaan dan Organisasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Evaluasi atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2194/SEKJEN/2023 tentang Sistem dan Mekanisme Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI	Laporan evaluasi atas Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Sistem dan Mekanisme Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI	-	-	1	-	Rp. 49.800.000	Telah terlaksana
Sosialisasi Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2194/SEKJEN/2023 tentang Sistem dan Mekanisme Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi	-	-	-	1	Rp. 53.150.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Implementasi Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2194/SEKJEN/2023 tentang Sistem dan Mekanisme Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI	Laporan implementasi sistem dan mekanisme kerja Sekretariat Jenderal DPR RI	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Pada indikator pelaksanaan Sistem Kerja Baru, telah dilaksanakan rencana aksi evaluasi atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2194/SEKJEN/2023 tentang Sistem dan Mekanisme Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Bagian Pembentukan Produk Hukum. Bersamaan dengan itu, pelaksanaan rencana aksi lainnya yang direncanakan akan diselesaikan di Triwulan IV telah terlaksana di Triwulan III.

Rencana aksi tersebut yaitu, pelaksanaan Sosialisasi Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2194/SEKJEN/2023 tentang Sistem dan Mekanisme Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 14 Juni 2024 di Ruang Rapat Pansus C.

Rencana aksi lainnya yang dijadwalkan pada Triwulan IV namun telah terlaksana pada Triwulan III adalah implementasi Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2194/SEKJEN/2023 tentang Sistem dan Mekanisme Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Terkait implementasi pelaksanaan Keputusan tentang Sistem dan Mekanisme Kerja ini, maka seluruh unit kerja mengadministrasikan pelaksanaan tugas *squad team* dalam bentuk Keputusan (baik untuk Tim yang mempunyai dampak anggaran/honor maupun yang tidak berdampak anggaran/honor) dan Surat Tugas. Dalam rangka pelaporan pelaksanaan sistem kerja, telah disampaikan naskah *softcopy* Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2194/SEKJEN/2023 tentang Sistem dan Mekanisme Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI dan beberapa contoh Keputusan/Surat Tugas yang menjadi gambaran pelaksanaan *squad team* di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Berkaitan dengan realisasi anggaran, dengan pagu Rp. 49.800.000, realisasi anggaran digunakan untuk kegiatan rapat dengan realisasi sebesar Rp. 2.310.000. Sedangkan untuk kegiatan sosialisasi, dengan pagu semula Rp. 53.150.000, dilakukan revisi anggaran, sehingga pagu yang ada menjadi Rp. 113.175.000, realisasi anggaran digunakan untuk kegiatan rapat dan pembayaran honor narasumber dengan realisasi sebesar Rp. 59.345.000.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/es3msQd2pKHPoxc>

3. Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional:

a. Indeks SPBE

<i>Leading Sector</i>	<i>Capaian 2022</i>	<i>Capaian 2023</i>	<i>Target 2024</i>	<i>Penanggung Jawab</i>
Kementerian PANRB	2,95	3,57	3,6	Pusat Teknologi Informasi

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Meningkatkan penerapan manajemen aset TIK	Laporan penerapan dan dokumentasi pengelolaan aset TIK yang fokus pada perangkat keras dan perangkat lunak	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Meningkatkan penerapan manajemen	Laporan peningkatan ruang lingkup UPR	1	1	1	1	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
risiko SPBE terhadap unit kerja (UPR)	berdasarkan prioritas risiko SPBE						
Menyusun dan menerapkan pedoman pengelolaan perubahan layanan TIK	Tersusunnya kebijakan/pedoman perubahan layanan SPBE dengan fokus pada perubahan layanan TIK yang diterapkan DPR RI	1	1	1	1	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Mengukur utilitas aplikasi/sistem informasi	Hasil evaluasi utilitas pemanfaatan aplikasi/sistem informasi di DPR RI	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Menyusun Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025-2029	RITIK dan Peta Jalan TIK Tahun 2025-2029 yang selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional	1	1	1	1	Rp. 800.000.000	Telah terlaksana

Pada rencana aksi penerapan manajemen aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Sekretariat Jenderal DPR RI sudah memanfaatkan aplikasi DigitAll, yang telah ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 798/SEKJEN/2024 tentang Penetapan Penggunaan Aplikasi DigitAll Keuangan yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2024. Surat Keputusan ini menjadi landasan formal untuk memulai transisi penggunaan aplikasi secara bertahap dalam pengelolaan aset TIK, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan akurasi manajemen aset sesuai dengan prinsip-prinsip SPBE.

Aplikasi ini diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan aset TIK. Sebagai contoh, proses pengembalian barang (aset TIK) yang sebelumnya memerlukan langkah manual dan dokumentasi fisik, kini dapat dilakukan secara digital melalui aplikasi DigitAll. Pengguna dapat melakukan permohonan pengembalian aset TIK dengan mengisi formulir elektronik yang terintegrasi, serta melacak status pengembalian secara *real-time*, sehingga mempercepat proses administrasi dan meminimalisir potensi kesalahan dalam pencatatan aset. Implementasi ini telah meningkatkan keandalan dan akuntabilitas manajemen aset TIK di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Kemudian pada rencana aksi peningkatan penerapan manajemen risiko SPBE terhadap unit kerja (UPR), telah dilakukan rapat koordinasi terkait Manajemen Risiko bersama konsultan pada tanggal 26 Juli 2024 dan 27 Agustus 2024, dengan fokus pada penyempurnaan *risk register* TI. Berdasarkan hasil rapat tersebut, disepakati bahwa *risk register* yang telah disusun perlu disesuaikan dengan format dan panduan dari Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 yang memuat siklus Proses Manajemen Risiko, 16 (enam belas)

Kategori Risiko dan 7 (tujuh) Area Dampak, serta memenuhi 5 (lima) Kertas Kerja Generik. Sebelumnya, *risk register* TI belum mengikuti ketentuan dari Peraturan Menteri PANRB tersebut karena masih mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1047 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Sekretariat Jenderal DPR RI. Selain itu, pada tahun 2022-2023, pengelolaan manajemen risiko lebih difokuskan pada penerapan Standar ISO 27001:2022, yang juga menjadi acuan dalam proses sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi.

Gambar 1.1 Kegiatan Peningkatan Penerapan Manajemen Risiko SPBE Terhadap Unit Kerja (UPR)

Pada rencana aksi penyusunan dan penerapan pedoman pengelolaan perubahan layanan TIK, telah disusun Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 5 Tahun 2024 tentang penerapan kebijakan pedoman pengelolaan aplikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Instruksi ini dibuat untuk memastikan terlaksananya Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2081 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Aplikasi, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan digital melalui penerapan SPBE. Instruksi ini juga menegaskan pentingnya integrasi dan interoperabilitas antar sistem aplikasi serta mencegah terjadinya duplikasi aplikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Lebih lanjut, Instruksi ini mengatur bahwa semua permohonan pengembangan aplikasi baru harus melalui proses analisis kebutuhan yang sesuai dengan tahapan System Development Life Cycle (SDLC). Selain itu, setiap aplikasi yang dikembangkan harus menjalani pemeliharaan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas layanan. Instruksi ini juga mendorong penyederhanaan dan integrasi aplikasi sesuai dengan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK), serta mendukung terciptanya interoperabilitas SPBE di unit kerja Sekretariat Jenderal DPR RI dan dengan instansi pusat serta pemerintah daerah lainnya.

Selanjutnya pada rencana aksi pengukuran utilitas aplikasi/sistem informasi, telah dilakukan rapat koordinasi terkait Pengukuran Utilitas Aplikasi bersama konsultan. Untuk proses awal dalam pengukuran utilitas aplikasi, konsultan melakukan penggalan informasi di internal Pusat Teknologi Informasi terkait kondisi aplikasi yang ada. Setelah ada gambaran aplikasi yang ada di Sekretariat Jenderal DPR RI, maka akan dilakukan konfirmasi ke unit kerja. Dilakukan juga pengecekan *activity log* aplikasi untuk melihat apakah aplikasi masih digunakan atau tidak. Konfirmasi ke unit kerja terkait aplikasi yang digunakan juga dilakukan saat diskusi penyusunan RITIK 2025-2027 ke unit kerja. Hasil akhirnya dapat diketahui utilitas aplikasi, untuk nantinya bisa diputuskan akan dilakukan disposal atau peleburan aplikasi. Maka pada dasarnya, data dari hasil pengukuran utilitas aplikasi ini dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan perbaikan, memastikan kualitas layanan, serta mendukung pengambilan keputusan dalam pemeliharaan, peningkatan, dan alokasi sumber daya IT agar layanan tetap efisien dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.



Gambar 1.2 Kegiatan Pengukuran Utilitas Aplikasi/Sistem Informasi

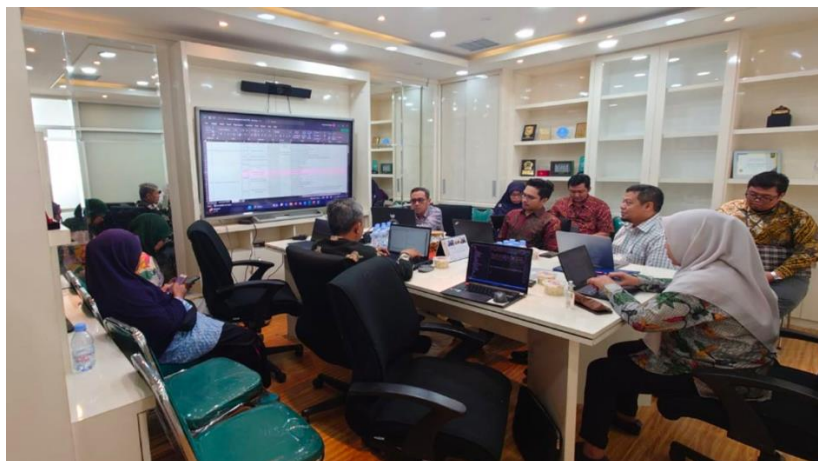
Pada rencana aksi ini, anggaran yang digunakan mengikuti anggaran pengadaan jasa konsultan Manajemen Layanan Teknologi Informasi (sama dengan anggaran yang digunakan untuk rencana aksi “Menyusun dan menerapkan pedoman pengelolaan perubahan layanan TIK”) sehingga akan dilakukan revisi pada rencana aksi bahwa pada anggaran rencana aksi “Mengukur utilitas aplikasi” akan bernilai Rp. 0 agar tidak rancu.

Rencana aksi terakhir dalam indikator Indeks SPBE, yaitu Penyusunan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025-2029 telah dilakukan *pre-kick off meeting* dengan konsultan penyusunan RITIK (PT. Gamatechno

Indonesia) pada tanggal 15 Agustus 2024. Pada rapat tersebut disampaikan bahwa RITIK menjadi acuan dasar pengembangan TIK di DPR RI. Cakupan dari kegiatan penyusunan RITIK ini adalah asesmen, analisis kesenjangan, arsitektur TIK, dan *roadmap*. Pengembangan teknologi informasi mencakup seluruh sistem tata kelola, bukan hanya pengembangan aplikasi. Disampaikan pula terkait *timeline* penyusunan RITIK.

Pada 27 Agustus 2024, telah dilaksanakan rapat koordinasi terkait RITIK untuk pengisian kertas kerja infrastruktur. Dari hasil rapat tersebut perlu disampaikan mengenai kondisi server saat ini untuk mengetahui kondisi *existing*. Perlu dipertimbangkan juga mengenai spesifikasi yang dibutuhkan terkait perpindahan ke IKN. Pada RITIK yang lama, belum tergambarkan keterkaitan antara perangkat, jenis koneksi, unit kerja yang menggunakan, dipasang di tahun berapa, serta nilai investasinya. Oleh karena itu untuk RITIK yang baru, bisa ditambahkan untuk proyeksi beberapa tahun kedepan dengan nilai investasi, serta perlu digambarkan juga keterhubungan referensi infrastruktur dengan proses bisnis yang terkait.

Saat ini, terhitung dari tanggal 11 s.d. 25 September 2024, sedang dilaksanakan asesmen terkait manajemen data di 21 (dua puluh satu) Unit Eselon II, termasuk Pusat Teknologi Informasi. Pada kesempatan tersebut diharapkan bisa tergambarkan akan kebutuhan teknologi informasi di setiap unit untuk kedepannya, permasalahan terkait teknologi informasi yang dirasakan selama ini, dan juga terkait pengelolaan data.



Gambar 1.3 Asesmen RITIK dengan Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif



Gambar 1.4 Asesmen RITIK dengan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/r65cBCg3exm3EKc>

b. Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Penanggung Jawab
Kementerian PANRB	-	1	3	Pusat Teknologi Informasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Melakukan evaluasi kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE	Laporan evaluasi dan rekomendasi eksistensi pengaturan arah pemanfaatan Arsitektur SPBE sebagai pedoman keterpaduan/integrasi SPBE	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Melakukan reviu aktual atas Arsitektur SPBE As-Is DPR RI	Laporan pembaharuan Arsitektur SPBE As-Is DPR RI pada aplikasi SIA SPBE V2 Kementerian PANRB	1	1	1	1	Rp. 60.000.000	Telah terlaksana
Menyusun Arsitektur SPBE To-Be DPR RI	Laporan penyusunan arsitektur SPBE To-Be DPR RI pada aplikasi SIA SPBE V2 Kementerian PANRB	-	1	1	1	Rp. 60.000.000	Belum terlaksana. Rencana aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Melakukan <i>gap analysis</i> dan menyusun Peta Rencana SPBE berdasarkan Arsitektur SPBE	Laporan penyusunan Peta Rencana SPBE berdasarkan Arsitektur SPBE	-	1	1	1	Rp. 0	Belum terlaksana, Rencana aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Pada rencana aksi pelaksanaan evaluasi kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE, telah dilakukan *pre-kick off meeting* dengan konsultan penyusunan RITIK (PT. Gamatechno Indonesia) pada tanggal 15 Agustus 2024. Pada rapat tersebut disampaikan bahwa RITIK menjadi acuan dasar pengembangan TIK di DPR RI. Cakupan dari kegiatan penyusunan RITIK ini adalah asesmen, analisis kesenjangan, arsitektur TIK, dan *roadmap*.

Pengembangan teknologi informasi mencakup seluruh sistem tata kelola, bukan hanya pengembangan aplikasi. Disampaikan pula terkait *timeline* penyusunan RITIK.

Pada 27 Agustus 2024, telah dilaksanakan rapat koordinasi terkait RITIK untuk pengisian kertas kerja infrastruktur. Dari hasil rapat tersebut perlu disampaikan mengenai kondisi server saat ini untuk mengetahui kondisi *existing*. Perlu dipertimbangkan juga mengenai spesifikasi yang dibutuhkan terkait perpindahan ke IKN. Pada RITIK yang lama, belum tergambarkan keterkaitan antara perangkat, jenis koneksi, unit kerja yang menggunakan, dipasang di tahun berapa, serta nilai investasinya. Oleh karena itu untuk RITIK yang baru, bisa ditambahkan untuk proyeksi beberapa tahun kedepan dengan nilai investasi, serta perlu digambarkan juga keterhubungan referensi infrastruktur dengan proses bisnis yang terkait.

Saat ini, terhitung dari tanggal 11 s.d. 25 September 2024, sedang dilaksanakan asesmen terkait manajemen data di 21 (dua puluh satu) Unit Eselon II, termasuk Pusat Teknologi Informasi. Pada kesempatan tersebut diharapkan bisa tergambarkan akan kebutuhan teknologi informasi di setiap unit untuk kedepannya, permasalahan terkait teknologi informasi yang dirasakan selama ini, dan juga terkait pengelolaan data.



Gambar 1.5 Asesmen RITIK dengan Biro Perencanaan dan Organisasi



Gambar 1.6 Asesmen RITIK dengan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma

Kemudian pada pelaksanaan reviu aktual atas Arsitektur SPBE As-Is DPR RI, telah dilakukan rapat koordinasi dengan penyedia jasa penyusunan RITIK DPR RI penyedia jasa penyusunan Arsitektur SPBE, dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana terkait proses bisnis Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 2 September 2024. Setelah dilakukan reviu, untuk arsitektur domain proses bisnis As-Is yang sudah diinput ke SIA SPBE v1, masih dalam bentuk *cluster* berdasarkan *Government Resouce Planning* (GRP). Oleh karena itu, perlu dilakukan pemutakhiran di SIA SPBE v2 dengan menggunakan dokumen proses bisnis organisasi (dari peta sub-proses).

Sedangkan untuk arsitektur domain layanan, sementara bisa menggunakan data dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Direncanakan pada akhir tahun akan ada hasil identifikasi layanan yang sudah ada di DPR RI secara resmi. Terdapat beberapa layanan yang belum ada proses bisnisnya, namun layanan tersebut sudah berjalan, ada standar pelayanannya, dan ada survei kepuasan masyarakatnya. Akan ada juga beberapa layanan yang di tahun depan akan menghilang karena adanya perubahan kebijakan.

Dokumen proses bisnis yang dimiliki Sekretariat Jenderal DPR RI belum menunjukkan bentuk inovasi dan belum dalam bentuk permodelan *Business Process Modeling Notation* (BPMN). Oleh karena itu proses bisnis perlu dibuat dalam bentuk BPMN dan proses input data bisa dilakukan di SIA SPBE v2. Saat ini, penyedia jasa penyusunan Arsitektur SPBE sedang melakukan *initial assessment* terkait domain proses bisnis, domain layanan, domain data, domain aplikasi, dan domain keamanan di Sekretariat Jenderal DPR RI. Kertas kerja arsitektur SPBE DPR RI ini masih dalam proses pengisian oleh Pusat Teknologi Informasi.



Gambar 1.7 Kegiatan Pelaksanaan Reviu Aktual Atas Arsitektur SPBE As-Is DPR RI

Sedangkan untuk rencana aksi pelaksanaan *gap analysis* dan penyusunan Peta Rencana SPBE berdasarkan Arsitektur SPBE, serta penyusunan Arsitektur SPBE To-Be DPR RI belum dapat terlaksana sesuai target penyelesaian yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana aksi. Terhadap penyusunan Arsitektur SPBE To-Be DPR RI dapat dilakukan setelah penyusunan pada salah satu modul di RITIK 2025-2027 selesai. Penyedia jasa penyusunan Arsitektur SPBE dan penyedia jasa penyusunan RITIK DPR RI akan melakukan kolaborasi dan koordinasi karena data yang digunakan untuk penyusunan arsitektur SPBE To-Be, proses *gap analysis*, dan penyusunan Peta Rencana SPBE pada SIA SPBE v2 akan menggunakan data hasil pengerjaan RITIK 2025-2027. Untuk itu, dua rencana aksi ini akan ditindaklanjuti di Triwulan IV.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/GiYrzAEFcHw6J4p>

4. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi: Indeks Perencanaan Pembangunan

<i>Leading Sector</i>	<i>Capaian 2022</i>	<i>Capaian 2023</i>	<i>Target 2024</i>	<i>Penanggung Jawab</i>
Kementerian PANRB	-	91,88	92	Biro Perencanaan dan Organisasi

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penguatan Perencanaan	Tersusunnya Revisi Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Tersusunnya Rencana Kerja DPR RI TA 2024	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Tersusunnya Revisi Rencana Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI TA 2024	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Peningkatan keselarasan informasi kinerja	Penyusunan Pohon Kinerja	1	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja 2024	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Tersusunnya dokumen Penyesuaian Perjanjian Kinerja 2024	-	-	1	-	Rp. 0	Tidak terlaksana

Pada kegiatan penyusunan dokumen penyesuaian Perjanjian Kinerja 2024 pada rencana aksi peningkatan keselarasan informasi kinerja tidak dilaksanakan dikarenakan sampai dengan Triwulan III belum terdapat urgensi untuk melakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja TA 2024. Hal ini diputuskan karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, revisi dan perubahan Perjanjian Kinerja hanya dapat dilakukan jika terjadi kondisi sebagai berikut:

- Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran;

- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Terkait hal tersebut, sampai dengan Triwulan III ini, salah satu dari syarat yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri PANRB dimaksud belum dialami oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, hal tersebut yang mendasari akan tidak ada urgensi kebutuhan untuk melakukan perubahan Perjanjian Kinerja, sehingga pada Triwulan III ini tidak dilaksanakan penyesuaian/perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/pLNpYjt39MNwKey>

5. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Penanggung Jawab
Kementerian PANRB	67,28	67,46	76	Biro Perencanaan dan Organisasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penguatan Perencanaan Kinerja	Tersusunnya Cascading dan Pohon Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 89 Tahun 2021	-	1	-	-	Rp. 25.875.000	Telah terlaksana
	Penyesuaian dokumen perencanaan kinerja 2024 berdasarkan Laporan Kinerja 2023	-	1 (50%)	1 (50%)	-	Rp. 25.500.000	Telah terlaksana
	Tersusunnya dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI 2025	-	-	1 (50%)	1 (50%)	Rp. 26.250.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	Tersusunnya Rencana Aksi 2024 Eselon I dan II	26	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Penguatan Pengukuran Kinerja	Pembangunan aplikasi e-SAKIP	1 (25%)	1 (25%)	1 (25%)	1 (25%)	Rp. 220.360.000	Telah terlaksana
	Updating data Aplikasi SIMATA untuk pengelolaan rotasi mutasi	-	1	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana
	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja	-	-	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Penguatan Pelaporan Kinerja	Tersusunnya Laporan Kinerja 2023 di Tingkat Eselon I dan II yang sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014	26	-	-	-	Rp. 174.258.000	Telah terlaksana
	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Triwulanan Tahun 2024	-	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Optimalisasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Tersusunnya Dokumen Evaluasi SAKIP Internal	-	-	5	-	Rp. 60.084.000	Telah terlaksana
	Tersusunnya Laporan Tindak Lanjut atas Evaluasi APIP	-	1	-	-	Rp. 5.808.000	Telah terlaksana
	Pemberian <i>reward</i> atas penilaian SAKIP unit kerja	-	-	1	-	Rp. 60.084.000	Telah terlaksana

Kegiatan penyesuaian dokumen perencanaan kinerja 2024 berdasarkan Laporan Kinerja 2023 yang terdapat pada rencana aksi penguatan perencanaan kinerja telah disusun dengan mengacu pada capaian kinerja tahun 2023. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan menetapkan target tahun 2024 yang lebih tinggi daripada capaian tahun sebelumnya. Pada perkembangan selanjutnya direncanakan untuk melakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI yang mengakomodasi Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Mutlak (SPTJM) Sekretaris Jenderal DPR RI pada beberapa target capaian kinerja. Hanya saja berdasarkan hasil evaluasi dan arahan Pimpinan, tidak dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja untuk tahun 2024 dan masih mengacu pada Perjanjian Kinerja terakhir yang ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2023.

Sedangkan kegiatan penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI 2025 belum dapat terlaksana dan ditunda hingga awal Triwulan IV. Penyusunan dan penetapannya akan dilakukan bersamaan dengan tersusunnya Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 dan ditetapkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025.

Selanjutnya kegiatan pembangunan aplikasi e-SAKIP pada rencana aksi penguatan pengukuran kinerja telah terlaksana di Triwulan III dengan fokus pengembangan pada komponen pengukuran kinerja. Salah satu aspek yang akan dimasukkan adalah adanya kotak jumlah target rencana aksi pada awal tahun dan capaian *output* per triwulan dalam rangka pengukuran triwulanan. Capaian per triwulanan tersebut akan menjadi dasar bagi Pejabat Eselon I dalam melakukan dialog kinerja dan memberikan penilaian yang akan terkoneksi dengan sistem informasi yang dimanfaatkan dalam pemberian tunjangan kinerja. Biro Perencanaan dan Organisasi tengah melakukan koordinasi dengan Pusat Teknologi Informasi dalam pengembangan lebih lanjut terkait penambahan fitur sebagaimana dimaksud. Data yang telah diinput dalam aplikasi e-SAKIP pada nantinya akan terhubung dengan laman web e-sakip.dpr.go.id, sehingga pengelolaan SAKIP Sekretariat Jenderal DPR RI dapat diakses oleh publik.

Pengembangan lebih lanjut yang akan dilakukan pada Triwulan III dan IV antara lain:

- a. Memformulasikan kembali kebutuhan untuk pengembangan sistem informasi e-SAKIP;
- b. Fokus utama pengembangan pada aspek pengukuran kinerja;
- c. Proses integrasi dengan sistem pengelolaan kinerja individu dalam rangka pembayaran tunjangan kinerja.

Kemudian pada kegiatan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja telah dilaksanakan menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang diatur melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1459/SEKJEN/2024. Pengembangan dan pemanfaatan metode ini bertujuan untuk mengukur kinerja organisasi dan menjadi rujukan evaluasi setiap semester atau setiap 6 (enam) bulan. *Balanced Scorecard* merupakan suatu metode pengukuran yang cukup komprehensif, mencakup pengukuran keuangan dan non-keuangan. Dalam *Balanced Scorecard* terdapat 4 (empat) proses manajemen yang baru, yang terbagi dan terkombinasi antara tujuan strategis jangka panjang dengan peristiwa-peristiwa jangka pendek. Penggunaan metode *Balanced Scorecard* dalam pengukuran kinerja tidak hanya dari kinerja finansial saja, namun juga melihat aspek inovasi, pembelajaran, dan performa lainnya. Metode *Balanced Scorecard* melihat banyak indikator dalam waktu bersamaan sehingga dapat memacu kinerja organisasi lebih *sustainable* dan tidak *short term*.

Pada kegiatan penyusunan dokumen Evaluasi SAKIP Internal yang merupakan bagian dari rencana aksi Optimalisasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Inspektorat telah melakukan penajaman kualitas catatan dan rekomendasi yang ditunjukkan dengan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Internal Tahun 2024 atas 5 (lima) Eselon I dan 21 (dua puluh satu) Eselon II. Catatan dan rekomendasi dalam Lembar Hasil Evaluasi (LHE) ditulis dengan menggunakan kalimat yang jelas dan persuasif untuk mendorong unit kerja dalam melakukan perbaikan. Dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi SAKIP, Tim Evaluator Inspektorat Utama mengadakan kegiatan rapat koordinasi dengan Unit Kerja terkait, dan Bagian Pengelolaan Kinerja

Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) untuk menyampaikan beberapa hal terkait Akuntabilitas Kinerja yang perlu dilakukan perbaikan.

Pada kegiatan pemberian *reward* atas penilaian SAKIP unit kerja telah dilaksanakan oleh Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI pada Rabu, 18 September 2024. Pemberian penghargaan tersebut diselenggarakan bertepatan dengan Seminar Nasional bertema "Implementasi Manajemen *Anti-Fraud* dalam Perwujudan *Good Governance* dan *Clean Government*" serta Pencanangan Pembangunan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti-Penyuapan. Seminar ini menjadi wujud komitmen Inspektorat Utama dalam mendukung upaya pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas, dan penguatan integritas di lingkungan DPR RI.

Dalam kesempatan ini, penghargaan juga diberikan kepada unit-unit terbaik atas Penilaian Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal DPR RI. Unit kerja yang menerima penghargaan tersebut antara lain:

- a. Peringkat Pertama: Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara;
- b. Peringkat Kedua: Biro Persidangan II; dan
- c. Peringkat Ketiga: Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat.



Gambar 1.8 Unit Kerja Penerima Penghargaan Implementasi SAKIP Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024

Kemudian sebagai bentuk penguatan Pengukuran Kinerja, Biro Perencanaan dan Organisasi melalui Bagian PKORB sebagai penanggung jawab atas pengumpulan data kinerja organisasi kini tengah mengembangkan sistem pengukuran kinerja unit kerja Eselon II. Hal ini dilaksanakan dalam rangka melakukan pengintegrasian pengukuran kinerja organisasi dan individu. Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dilakukan dengan membandingkan capaian rencana aksi Perjanjian Kinerja tahunan dengan capaian kinerja per triwulan seluruh unit kerja Eselon II. Menjadikan perbandingan antara target tahunan dan realisasi ini sesuai dengan definisi pengukuran kinerja yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Selain mengukur pencapaian kinerja sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Bagian PKORB juga tengah mengembangkan sistem dialog kinerja di antara pimpinan unit Eselon I dan unit Eselon II berdasarkan hasil pengukuran triwulanan maupun tahunan yang akan

dikembangkan menjadi suatu sistem informasi yang juga akan terintegrasi dengan sistem perhitungan tunjangan kinerja. Jika suatu unit kerja tidak dapat mencapai realisasi atas target yang telah dijelaskan pada rencana aksi di awal tahun, maka mereka wajib melakukan klarifikasi mengapa target tersebut tidak tercapai. Jika pimpinan unit Eselon I memahami dan menyetujui klarifikasi tersebut, maka akan menjadi dasar perhitungan komponen pemberian tunjangan kinerja dari komponen kinerja organisasi sebesar 10%. Jika Pimpinan unit Eselon I tidak menyetujui klarifikasi tersebut, maka akan terjadi pengurangan tunjangan kinerja sebesar 10% pada triwulan tersebut bagi seluruh pegawai di unit kerja terkait.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/YkRBGL7KaiLBM9q>

6. Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja: Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI)

<i>Leading Sector</i>	<i>Capaian 2022</i>	<i>Capaian 2023</i>	<i>Target 2024</i>	<i>Penanggung Jawab</i>
Kementerian PANRB	4 unit	5 unit	6 unit	Inspektorat I dan II

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penetapan unit kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	SK pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	1	-	-	-	Rp. 2.904.000	Telah terlaksana
Pendampingan pembangunan ZI oleh Inspektorat Utama	Laporan Pendampingan ZI	4	4	-	-	Rp. 17.424.000	Telah terlaksana
Pembangunan dan Penilaian Mandiri Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI	Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Unit ZI	-	5	-	-	Rp. 17.424.000	Telah terlaksana
Melaksanakan Survei Penilaian Persepsi Korupsi dan Survei Penilaian Kualitas Pelayanan	Laporan survei	-	5	-	-	Rp. 17.424.000	Telah terlaksana
Evaluasi unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK/WBBM telah memenuhi syarat dan kriteria pengusulan unit	Dokumen persyaratan pengajuan unit ZI	-	1	-	-	Rp. 17.424.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
kerja menuju WBK/WBBM sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021							
Evaluasi pembangunan ZI oleh Tim Penilai Internal (TPI) untuk diajukan ke Tim Penilai Nasional (TPN)	Surat pengajuan unit kerja menuju WBK	-	1	-	-	Rp. 17.424.000	Telah terlaksana
Proses evaluasi oleh TPN	Surat undangan wawancara	-	-	1	-	Rp. 2.904.000	Belum terlaksana. Kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan IV
	Surat Permintaan validasi survei ZI	-	-	1	-	Rp. 2.904.000	Belum terlaksana. Kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan IV
	Verifikasi lapangan unit ZI	-	-	1	-	Rp. 2.904.000	Belum terlaksana. Kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan IV
	Lembar Hasil Evaluasi (LHE) Kementerian PANRB	-	-	-	1	Rp. 2.904.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Seluruh rencana aksi yang direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan III dalam indikator Pembangunan ZI belum dapat terlaksana. Kegiatan pengiriman surat undangan wawancara, surat permintaan validasi survei ZI, dan verifikasi lapangan unit ZI yang terdapat dalam rencana aksi proses evaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN) belum dapat terlaksana dikarenakan sampai dengan tanggal 3 September 2024, proses evaluasi ZI oleh TPN masih dalam tahap Seleksi Administrasi dan Kementerian PANRB belum mengirimkan surat undangan wawancara, surat permintaan validasi, dan surat verifikasi lapangan Unit ZI kepada Sekretariat Jenderal DPR RI. Kegiatan ini akan ditindaklanjuti pada Triwulan IV 2024.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/otzXa6AC93gsiYo>

7. Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Tingkat Maturitas SPIP

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Penanggung Jawab
BPKP	Level 3 (3,185)	Level 3 (3,270)	Level 3 (3,28)	Inspektorat II

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Melaksanakan proses Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) SPIP Terintegrasi secara substansi dan prosedur penilaian mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021	SK Tim Penilaian Mandiri (PM) dan SK Tim atau Surat Tugas Penjaminan Kualitas (PK) yang mana pesertanya telah mengikuti diklat/bimbingan teknis/sosialisasi SPIP	-	2	-	-	Rp. 110.119.000	Telah terlaksana
Penyesuaian dokumen perencanaan kinerja dengan penetapan target yang telah disesuaikan dengan capaian sebelumnya	Dokumen Indikator dan Target Kinerja PK yang telah direvisi	-	1	-	-	Rp. 5.808.000	Telah terlaksana
Pembuatan <i>cascading</i> kinerja berdasarkan <i>logical framework</i> dan <i>critical success factor</i>	Dokumen <i>cascading</i> kinerja	-	1	-	-	Rp. 5.808.000	Telah terlaksana
Melakukan analisis risiko terkait dengan risiko korupsi pada kegiatan utama yang menghasilkan peta risiko korupsi dan rencana tindak pengendalian yang terjadwal	<i>Risk Register</i> dan Laporan penyusunan peta risiko korupsi dan rencana tindak pengendalian	-	-	1	-	Rp. 5.808.000	Belum terlaksana. Rencana aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Analisis risiko digunakan sebagai dasar bahan penyusunan rencana tindak pengendalian	Laporan Monitoring Penanganan Risiko	-	-	1	-	Rp. 5.808.000	Belum terlaksana. Rencana aksi akan

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
dan secara berkala mendokumentasikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana tindak pengendalian dengan baik							dilaksanakan pada Triwulan IV
Melakukan monitoring dan dievaluasi secara berkala atas pelaksanaan sistem antikorupsi yang sudah ada (FCP)	Laporan atas monitoring dan evaluasi atas pedoman, peta proses bisnis dan SOP	-	-	-	1	Rp. 5.808.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Memantau dan mengoptimalkan tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK untuk meminimalkan terjadinya temuan berulang, temuan terkait pengelolaan BMN, dan temuan terkait ketaatan	Laporan atas pemantauan dan tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK	-	1	1	1	Rp. 103.000.000	Telah terlaksana

Pelaksanaan rencana aksi pemantauan dan optimalisasi tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK untuk meminimalkan terjadinya temuan berulang, temuan terkait pengelolaan BMN, dan temuan terkait ketaatan telah terlaksana sebagaimana tercantum pada Laporan Pemantauan TLHP BPK RI Semester II TA 2023.

Bersamaan dengan itu, rencana aksi penyesuaian dokumen perencanaan kinerja dengan penetapan target yang telah disesuaikan dengan capaian sebelumnya yang belum terlaksana pada Triwulan II pun telah terlaksana di Triwulan III. Berdasarkan keterangan dari Bagian PKORB dalam pembahasan tindak lanjut rekomendasi atas Hasil Evaluasi SAKIP Internal Sekretariat Jenderal DPR RI, Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 tidak dilakukan perubahan dengan pertimbangan periode tahun 2020 - 2024 yang sudah mendekati batas akhir periodenya.

Namun, untuk rencana aksi analisis risiko terkait dengan risiko korupsi pada kegiatan utama yang menghasilkan peta risiko korupsi dan rencana tindak pengendalian yang terjadwal belum dapat terlaksana. Analisis Risiko Korupsi (*Fraud*) yang dimuat dalam *Risk Register* Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025 belum dilakukan dan akan dilaksanakan koordinasi lebih lanjut dengan Bagian PKORB. Rencana aksi ini akan ditindaklanjuti pada Triwulan IV.

Begitu pula pada rencana aksi analisis risiko digunakan sebagai dasar bahan penyusunan rencana tindak pengendalian dan secara berkala mendokumentasikan dan mengevaluasi

pelaksanaan rencana tindak pengendalian dengan baik pun belum dapat terlaksana. Rencana aksi ini selanjutnya akan ditindaklanjuti ada Triwulan IV.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/mCnWowTqgfLZpb6>

8. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)

<i>Leading Sector</i>	<i>Capaian 2022</i>	<i>Capaian 2023</i>	<i>Target 2024</i>	<i>Penanggung Jawab</i>
Kementerian PANRB	100%	2	4	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Pembangunan aplikasi/ <i>dashboard</i> pengaduan berbasis AI	Aplikasi/ <i>dashboard</i> pengaduan berbasis AI	-	-	1	-	Rp. 498.500.000	Telah terlaksana
Publikasi media sosial dan mekanisme pengaduan DPR RI	Unggahan konten media sosial dan mekanisme pengaduan DPR RI ke sosial media Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	-	1	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Pembuatan video testimoni pengaduan masyarakat oleh anggota DPR RI	Video testimoni pengaduan masyarakat oleh Anggota DPR RI	-	-	1	-	Rp. 10.000.000	Telah terlaksana
Pembentukan Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Tim Kerja Integrasi Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan terintegrasinya Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat	2	-	-	-	Rp. 204.400.000	Telah terlaksana
Koordinasi pembahasan tindak	Terlaksananya koordinasi tindak lanjut	1	1	2	-	Rp. 232.534.960	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
lanjut pengaduan masyarakat dengan unit kerja terkait dalam Tim Kerja Integrasi Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat	pengaduan masyarakat dengan unit kerja terkait dalam Tim Kerja Integrasi Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat						
FGD Optimalisasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Sebagai Dukungan Peningkatan Kualitas Tugas Dan Fungsi Pengawasan DPR RI	Tercapainya SDM yang kompeten dalam mengelola pengaduan masyarakat	1	-	1	-	Rp. 201.200.000	Telah terlaksana
Bimbingan teknis pengelolaan pengaduan masyarakat	Tercapainya SDM yang kompeten dalam mengelola pengaduan masyarakat	-	-	-	1	Anggaran Pusbangkom	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Pada Triwulan III, dilakukan penyesuaian rencana aksi pada indikator Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR). Rencana aksi pembangunan aplikasi/*dashboard* pengaduan berbasis AI yang semula ditargetkan pada Triwulan IV, dilaksanakan pada Triwulan III. Kemudian rencana aksi koordinasi pembahasan tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan unit kerja terkait dalam Tim Kerja Integrasi Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat yang semula ditargetkan hanya pada Triwulan I dan II dengan masing-masing 1 (satu) kegiatan, pada Triwulan III, rencana aksi ini juga dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kegiatan.

Rencana aksi pembangunan aplikasi/*dashboard* pengaduan berbasis AI telah terlaksana dan dilakukan *launching* pada Triwulan III. *Work flow* penanganan Pengaduan Masyarakat yang memerlukan analisis pengaduan membuat adanya penambahan waktu pengerjaan analisa pengaduan yang beberapa kali dikeluhkan masyarakat. Untuk itu, otomatisasi analisis pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh *Artificial Intelligence* (AI) diharapkan dapat membantu mempercepat penanganan pengaduan kepada masyarakat dan Anggota DPR RI sebagai *stakeholders* Bagian Pengaduan Masyarakat.

Kemudian pada rencana aksi *Focus Group Discussion* (FGD) Optimalisasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Sebagai Dukungan Peningkatan Kualitas Tugas Dan Fungsi Pengawasan DPR RI telah terlaksana pada tanggal 17-19 Juli 2024. FGD dengan tema “Analisis Hukum di Bidang Hukum Tata Usaha Negara” dilaksanakan untuk memberikan pemahaman dan menguraikan ketentuan yang berkaitan dengan hukum acara yang berlaku dalam proses di Peradilan Tata Usaha Negara, mulai dari asas peradilannya, subjek, objek, gugatan dalam PTUN, proses pemeriksaan dan pembuktian di PTUN, Putusan PTUN, upaya hukum terhadap Putusan PTUN, sampai dengan kewenangan PTUN memeriksa dan menyelesaikan sengketa.



Gambar 1.9 Kegiatan FGD Pengaduan Masyarakat

Selanjutnya pada rencana aksi koordinasi pembahasan tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan unit kerja terkait dalam Tim Kerja Integrasi Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat. Rencana aksi ini dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan *benchmarking*, yaitu Kunjungan Perbandingan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI ke Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Ombudsman DIY; dan Kunjungan Perbandingan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI ke Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Timur.



Gambar 1.10 Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

Rencana aksi pembuatan video testimoni pengaduan masyarakat oleh Anggota DPR RI juga telah dilaksanakan pada bulan September 2024. Video testimoni Pengaduan Masyarakat tersebut dapat diakses melalui *link* eviden yang tercantum di bawah.



Gambar 1.11 Video Testimoni Pengaduan Masyarakat

Mengikuti penyesuaian pada rencana aksi, anggaran yang disediakan untuk indikator Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) juga dilakukan penyesuaian. FGD mengenai Optimalisasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Sebagai Dukungan Peningkatan Kualitas Tugas Dan Fungsi Pengawasan DPR RI menggunakan anggaran Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat sebesar Rp. 195.800.000. Selanjutnya, untuk kegiatan pembuatan video testimoni Pengaduan Masyarakat oleh Anggota DPR RI menggunakan anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 10.000.000. Sedangkan kegiatan pembuatan aplikasi Artificial Intelligence for Recommendation Analysis (AIRA) Pengaduan Masyarakat DPR RI menggunakan anggaran Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat sebesar Rp. 98.500.000 dan anggaran Pusat Teknologi Informasi sebesar Rp. 400.000.000. Kemudian untuk penambahan kegiatan pada rencana aksi koordinasi pembahasan tindak lanjut Pengaduan Masyarakat dengan unit kerja terkait dalam Tim Kerja Integrasi Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat menggunakan anggaran sebesar Rp. 55.876.000 dan Rp. 58.348.960.

Link eviden <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/5QcCDxZWfKjynHG>

9. Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei Penilaian Integritas (SPI)

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Penanggung Jawab
Kementerian PANRB	77,43	59,7	78,9	Inspektorat Utama

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Melaksanakan sosialisasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Edaran terkait kewajiban PPK dalam menyusun kertas kerja rencana umum pengadaan dan menginput Pengadaan Barang/Jasa pada aplikasi SIRUP	Dokumen rekapitulasi minimal 70% dari total nilai pengadaan telah diinput dalam Aplikasi SIRUP	1	-	-	-	Rp. 347.942.745	Telah terlaksana
Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait <i>e-purchasing</i> dan tata cara perhitungan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Persentase peserta yang hadir dalam sosialisasi dan bimbingan teknis berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan	1	-	-	-	Rp. 510.232.000	Telah terlaksana
Melaksanakan sosialisasi <i>probity audit</i>	Persentase peserta yang hadir dalam sosialisasi berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan	-	1	-	-	Rp. 171.695.850	Telah terlaksana
Melaksanakan bimbingan teknis kepada PPK dengan mengundang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait penginputan data Pengadaan	Persentase peserta yang hadir dalam bimbingan teknis berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan	-	-	-	1	Rp. 302.412.255	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Barang/Jasa (PBJ) di Aplikasi SIRUP							
Melaksanakan pembinaan kepada vendor/penyedia terkait pengenalan e-katalog sektoral, serta informasi lain terkait pengadaan di Sekretariat Jenderal DPR RI	Persentase vendor/penyedia yang hadir dalam sosialisasi berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan	-	1	-	-	Rp. 115.895.000	Telah terlaksana
Menyusun rencana aksi dari hasil evaluasi Sistem Merit di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2023	Rencana aksi terkait evaluasi Sistem Merit yang telah disusun dan diformalkan oleh Kepala Biro SDMA	-	1	-	-	Rp. 333.159.040	Telah terlaksana
Melakukan monitoring terkait tindak lanjut rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dari hasil evaluasi Sistem Merit	Minimal 50% dari total rekomendasi telah ditindaklanjuti berdasarkan hasil evaluasi Sistem Merit	-	1	-	-	Rp. 6.900.000	Telah terlaksana
Melakukan sosialisasi tentang Manajemen Talenta di Sekretariat Jenderal DPR RI	Persentase peserta yang hadir dalam sosialisasi berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan	-	1	-	-	Rp. 320.452.950	Telah terlaksana
Melaksanakan <i>workshop</i> tentang disiplin pegawai	Persentase peserta yang hadir dalam sosialisasi dan <i>workshop</i> berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan	1	-	-	-	Rp. 186.000.000	Telah terlaksana
Melaksanakan sosialisasi penanganan benturan kepentingan berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal No. 3 Tahun 2021	Persentase peserta yang hadir dalam sosialisasi dan bimbingan teknis berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan	-	1	-	-	Rp. 171.695.850	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Menandatangani Pakta Integritas oleh calon pimpinan/pejabat di instansi	Minimal 50% dari total calon pimpinan/pejabat instansi telah menandatangani Pakta Integritas sebelum memangku jabatannya	-	-	-	1	Rp. 38.955.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Melaksanakan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Minimal 50% dari kasus benturan kepentingan telah dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Utama				1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Melaksanakan sosialisasi pencegahan terkait kebijakan, regulasi, dan mekanisme pelaporan/pengelolaan gratifikasi, pengaduan dan perlindungan terhadap pelapor	Persentase peserta yang hadir dalam sosialisasi dan bimbingan teknis berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan	-	1	-	-	Rp. 39.432.750	Telah terlaksana
Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi	Minimal 50% dari kasus suap/gratifikasi telah dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Utama	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Mengikutsertakan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dalam pelatihan <i>e-Learning</i> KPK terkait Antikorupsi dan Integritas	Minimal 50% dari total Tim UPG telah mengikuti <i>e-Learning</i> KPK terkait Antikorupsi dan Integritas	-	-	1 (15 %)	1 (50 % kumulatif)	Rp. 5.500.000	Telah terlaksana
Menyusun dan melakukan sosialisasi kebijakan terkait kewajiban dalam penyusunan laporan kegiatan tim untuk intensifikasi penegakan aturan mengenai penyalahgunaan honor kegiatan	Telah tersosialisasikannya kebijakan terkait kewajiban dalam penyusunan laporan kegiatan tim melalui Surat Edaran dari Biro Keuangan	-	1	-	-	Rp. 200.000.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Melaksanakan pertanggungjawaban secara <i>at cost</i> melalui penerbitan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 11/SE-SEKJEN/2023 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Biaya Transportasi Dari DKI Jakarta Ke Kabupaten/Kota Sekitar dan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2522/SEKJEN/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Wilayah DKI Jakarta oleh Tenaga Ahli Anggota Daerah Pemilihan DKI Jakarta sebagai bentuk penegakan aturan mengenai penyalahgunaan perjalanan dinas	Terbitnya Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 11/SE-SEKJEN/2023 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Biaya Transportasi Dari DKI Jakarta Ke Kabupaten/Kota Sekitar dan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2522/SEKJEN/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Wilayah DKI Jakarta oleh Tenaga Ahli Anggota Daerah Pemilihan DKI Jakarta	-	1	-	-	Rp. 200.000.000	Telah terlaksana
Menyusun Laporan Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan (PIPK) untuk pengendalian tambahan terhadap transport lokal serta menilai efektivitas pengendalian yang sudah ada	Tersusunnya Laporan PIPK terkait pengendalian tambahan terhadap transport lokal serta menilai efektivitas pengendalian yang sudah ada	-	-	1	-	Rp. 200.000.000	Belum terlaksana. Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Melaksanakan sosialisasi terkait perjalanan dinas kepada Tenaga Ahli	Persentase peserta yang hadir dalam sosialisasi dan bimbingan teknis berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan	1	-	-	-	Rp. 251.785.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Melaksanakan monitoring pengendalian intern atas proses bisnis dan pelaporan anggaran	Tersusunnya laporan monitoring pengendalian intern atas proses bisnis dan pelaporan anggaran	-	-	1	-	Rp. 300.000.000	Belum terlaksana. Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Pada Triwulan III, terdapat beberapa penyesuaian rencana aksi indikator SPI, diantaranya yaitu:

- Rencana aksi pelaksanaan pembinaan kepada vendor/penyedia terkait pengenalan e-katalog sektoral, kewajiban membuat pakta integritas, serta informasi lain terkait pengadaan di Sekretariat Jenderal DPR RI, dilakukan penyesuaian menjadi pelaksanaan pembinaan kepada vendor/penyedia terkait pengenalan e-katalog sektoral serta informasi lain terkait pengadaan di Sekretariat Jenderal DPR RI;
- Rencana aksi pelaksanaan sosialisasi tentang Manajemen Talenta di Sekretariat Jenderal DPR RI yang ditargetkan pada Triwulan II sampai dengan Triwulan IV, disesuaikan pelaksanaannya menjadi hanya pada Triwulan II saja;
- Rencana aksi pengikutsertaan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dalam pelatihan e-Learning KPK terkait Antikorupsi dan Integritas yang semula ditargetkan pada Triwulan III, dilakukan penyesuaian pelaksanaannya menjadi pada Triwulan III dengan target penyelesaian minimal 15% dan Triwulan IV dengan target penyelesaian minimal 50% kumulatif;
- Rencana aksi penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan terkait kewajiban dalam penyusunan laporan kegiatan tim untuk intensifikasi penegakan aturan mengenai penyalahgunaan honor kegiatan yang semula indikatornya adalah minimal 50% dari total jumlah tim telah menyusun laporan kegiatan, menjadi telah tersosialisasikannya kebijakan terkait kewajiban dalam penyusunan laporan kegiatan tim melalui Surat Edaran dari Biro Keuangan;
- Rencana aksi pelaksanaan *workshop* tentang disiplin pegawai yang semula indikatornya adalah persentase peserta yang hadir dalam sosialisasi dan bimbingan teknis berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan, menjadi persentase peserta yang hadir dalam *workshop* berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan;
- Rencana aksi penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan terkait pemberian bukti *timestamp* keterangan *geolocation* dalam hal intensifikasi penegakan aturan mengenai penyalahgunaan perjalanan dinas dengan indikator minimal 50% dari setiap pegawai yang melakukan perjalanan dinas telah memberikan bukti *timestamp* keterangan *geolocation* dalam hal intensifikasi penegakan aturan mengenai penyalahgunaan perjalanan dinas, dilakukan perubahan menjadi pelaksanaan pertanggungjawaban secara *at cost* melalui penerbitan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 11/SE-SEKJEN/2023 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Biaya Transportasi Dari DKI Jakarta Ke Kabupaten/Kota Sekitar dan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2522/SEKJEN/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Wilayah DKI Jakarta oleh Tenaga Ahli Anggota Daerah Pemilihan DKI Jakarta sebagai bentuk penegakan aturan mengenai penyalahgunaan perjalanan dinas dengan indikator terbitnya Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 11/SE-SEKJEN/2023 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Biaya Transportasi Dari DKI Jakarta Ke Kabupaten/Kota Sekitar dan Surat Keputusan SEKJEN Nomor 2522/SEKJEN/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Perjalanan Dinas Di Wilayah DKI Jakarta oleh Tenaga Ahli Anggota Daerah Pemilihan DKI Jakarta.

Berdasarkan penyesuaian yang dilakukan, dapat dilaporkan bahwa rencana aksi pengikutsertaan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dalam pelatihan *e-Learning* KPK terkait Antikorupsi dan Integritas telah terlaksana. Terhitung sudah 19,44% atau 7 (tujuh) dari 36 (tiga puluh enam) anggota Tim UPG telah ikut serta dalam pelatihan *e-Learning* KPK terkait Antikorupsi dan Integritas.

Kemudian untuk rencana aksi penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan terkait kewajiban dalam penyusunan laporan kegiatan tim untuk intensifikasi penegakan aturan mengenai penyalahgunaan honor kegiatan yang belum terlaksana di Triwulan II, telah terlaksana di Triwulan III. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Biro Keuangan, telah disusun Surat Edaran untuk penyusunan laporan kegiatan tim sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Surat Keputusan Tim dengan honor.

Selanjutnya, rencana aksi pelaksanaan monitoring terkait tindak lanjut rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dari hasil evaluasi Sistem Merit yang juga tertunda di Triwulan II, telah terlaksana pada Triwulan III. Telah disusun Laporan Pelaksanaan Sistem Merit serta Laporan Pembangunan Manajemen Talenta di Sekretariat Jenderal DPR RI. Kedua laporan ini sudah menyampaikan tindak lanjut dan *progress* yang dilakukan oleh Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dalam pelaksanaan evaluasi Sistem Merit. Untuk persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sudah di atas 50% dikarenakan rekomendasi yang belum hanyalah berupa pemberian tunjangan kinerja berdasarkan aspek kinerja.

Begitu pula dengan rencana aksi pelaksanaan pembinaan kepada vendor/penyedia terkait pengenalan e-katalog sektoral, serta informasi lain terkait pengadaan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang seharusnya dilaksanakan pada Triwulan II, namun baru terlaksana di Triwulan III dengan persentase kehadiran sejumlah 77,84% (hadir 151 peserta dari total 194 undangan). Namun untuk kewajiban pembuatan Pakta Integritas belum dibahas dalam sosialisasi tersebut, berdasarkan hasil konfirmasi dengan Bagian Pengadaan Barang/Jasa, akan disusun surat himbuan kepada Penyedia/Vendor untuk pembuatan Pakta Integritas dalam setiap kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.

Sedangkan rencana aksi menyusun Laporan Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan (PIPK) untuk pengendalian tambahan terhadap transport lokal serta menilai efektivitas pengendalian yang sudah ada, belum dapat terlaksana karena berdasarkan hasil konfirmasi dengan Biro Keuangan, akan dilaksanakan penilaian lapangan di bulan November 2024 untuk evaluasi atas pengendalian internal dan proses bisnis pelaporan keuangan. Hasil penilaian lapangan ini akan dijadikan bahan dalam penyusunan laporan PIPK di akhir tahun. Untuk itu, rencana aksi ini akan ditunda ke Triwulan IV.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/DxbN7EZrnSJJ4dA>

10. Pelaksanaan Pembentukan Peraturan: Indeks Reformasi Hukum (IRH)

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Penanggung Jawab
Kementerian Hukum dan HAM	-	98,80	99	Pusat Perancangan Undang-Undang

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Variabel I: Membuat surat ke Kemenkumham mengenai indikator penilaian	Surat pernyataan mengenai indikator penilaian dan daftar RUU yang telah dilakukan harmonisasi	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Variabel II: 1. TOR terkait pelatihan peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan	TOR pelatihan peningkatan kompetensi (FGD/Workshop/Seminar)	-	1	1	1	Rp. 132.120.000	Telah terlaksana
		1	1	1	1	Rp. 200.000.000	Telah terlaksana
2. Penyelenggaraan pelatihan peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya pelatihan peningkatan kompetensi (FGD/Workshop/Seminar)	-	1	1	1	Rp. 132.120.000	Telah terlaksana
		1	1	1	1	Rp. 200.000.000	Telah terlaksana
Variabel III: 1. Penyusunan SK dan Surat Tugas kegiatan kajian dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau kegiatan	1. SK pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Kajian dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
pemantauan pelaksanaan Undang-Undang	putusan Mahkamah Konstitusi						
	2. Surat Tugas Tim Penyusunan Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1	1	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana
2. Penyusunan laporan hasil kajian dan evaluasi Undang-Undang	1. Dokumen daftar Undang-Undang yang telah dilakukan evaluasi	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
	2. Dokumen laporan hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan Undang-Undang dan kajian dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi	7	7	7	2	Rp. 349.412.000	Telah terlaksana
3. Pengiriman rekomendasi hasil kegiatan kajian dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau kegiatan pemantauan	Dokumen bukti dukung pengiriman rekomendasi hasil kegiatan kajian dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
pelaksanaan Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi dan/atau kegiatan pemantauan pelaksanaan Undang-Undang						
4. Penyusunan dokumen rekap data pejabat fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif yang dilibatkan dalam melakukan kajian dan evaluasi Undang-Undang	Dokumen rekap data pejabat fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Variabel IV: 1. Pengumpulan Data Dukung Kebijakan pengelolaan JDIH di Sekretariat Jenderal DPR RI (Peraturan, Keputusan, SOP)	Dokumen Terkait Kebijakan Pengelolaan JDIH di Sekretariat Jenderal DPR RI (Peraturan, Keputusan, SOP)	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
2. Pelaksanaan Pengembangan JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI (dengan kegiatan <i>Benchmarking</i> , <i>Konsinyering</i>)	Laporan Kegiatan <i>Benchmarking</i>	-	1	-	-	Rp. 48.758.000	Telah terlaksana
3. Pelaksanaan Pelaporan Pengembangan JDIH melalui <i>e-Report</i>	<i>Screenshot</i> bukti pengisian <i>e-Report</i>	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
4. Membuat Abstrak Peraturan yang diunggah ke Website JDIH	Dokumen terkait Abstrak Peraturan yang diunggah di	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	website JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI						
5. Mengumpulkan <i>Capture Metadata</i> Pengolahan Dokumen Hukum, URL Integrasi, Log Sinkronisasi Integrasi, Media Sosial	<i>Screenshot Dashboard Portal JDIH</i>	-	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana
6. Menunggah aktifitas Pengelolaan dan Pengembangan JDIH, serta informasi mengenai JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Media Sosial JDIH (Instagram)	<i>Screenshot bukti upload di media sosial</i>	-	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
7. Menyusun Rekapitulasi Data Produk Hukum yang telah diunggah di JDIH	Dokumentasi hasil rekapitulasi data produk hukum yang telah di unggah di JDIH	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Selama Triwulan III Tahun 2024, Pusat Perancangan Undang-Undang, Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang, Biro Hukum, serta Badan Legislasi telah melaksanakan seluruh rencana aksi yang telah ditetapkan.

Badan Legislasi telah melakukan harmonisasi sejumlah Rancangan Undang-Undang yang diusulkan oleh Alat Kelengkapan Dewan. Pada Triwulan III, Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Polhukham dan Bidang Ekkuinbangkesra juga telah mengikuti Seminar dan Diskusi Panel “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Evaluasi dan Tantangan ke Depan” yang diselenggarakan pada tanggal 29 Juli 2024.

Pada saat bersamaan, Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang telah melaksanakan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan serta menyampaikan 3 (tiga) buku analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan 4 (empat) buku kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang hasil kajian

tersebut ke Alat Kelengkapan Dewan terkait seperti Badan Legislasi, Komisi I, Komisi III, Komisi IV, dan Komisi VIII.

Selanjutnya, Biro Hukum telah menyusun Abstrak Peraturan yang dapat dilihat dan diunggah di Website JDIH, serta mengunggah aktivitas Pengelolaan dan Pengembangan JDIH dan informasi mengenai JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Media Sosial JDIH. Biro Hukum juga telah mengumpulkan *Capture* Metadata Pengolahan Dokumen Hukum, URL Integrasi, Log Sinkronisasi Integrasi, Media Sosial.

Pada Triwulan III, Tim Kerja IRH pun telah melakukan rapat koordinasi terkait pengisian LKE dan pemenuhan bukti dukung dalam aplikasi IRH. LKE IRH telah di *submit* sebelum tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yaitu pada tanggal 31 Juli 2024.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/9nCf7f82TQTX9eS>

11. Pelaksanaan Arsip Digital: Kualitas Pengelolaan Arsip Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip

<i>Leading Sector</i>	<i>Capaian 2022</i>	<i>Capaian 2023</i>	<i>Target 2024</i>	<i>Penanggung Jawab</i>
ANRI	77,99	98,38	98,38	Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Pemeliharaan Kaset	Terpeliharanya Arsip Kaset	1	-	-	-	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Pemeliharaan Mini DV	Terpeliharanya Arsip Mini DV	1	-	-	-	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Pemeliharaan CD/DVD	Terpeliharanya Arsip CD/DVD	-	1	-	-	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Pemeliharaan Mobile File (<i>Roll O Pack</i>)	Terpeliharanya Mobile File	-	-	1	-	Rp. 134.800.000	Telah terlaksana
Pemeliharaan Mesin Cacah	Terpeliharanya Mesin Cacah	-	1	-	-	Rp. 50.000.000	Telah terlaksana
Pemeliharaan Mesin Potong	Terpeliharanya Mesin Potong	-	-	-	1	Rp. 50.000.000	Rencana aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Pemeliharaan Lemari Kaset	Terpeliharanya Lemari Penyimpanan Arsip Kaset	-	1	-	-	Rp. 90.000.000	Telah terlaksana
Sewa Ruang Arsip Satu	Tersedianya Ruang Penyimpanan Arsip	1	1	1	1	Rp. 200.000.000	Telah terlaksana
Sewa Ruang Arsip Dua	Tersedianya Ruang Penyimpanan Arsip	1	1	1	1	Rp. 200.000.000	Telah terlaksana
Workshop/Bimbingan teknis/Seminar/Focus Group Discussion (FGD)	Terselenggaranya kegiatan Workshop/Bimbingan teknis/Seminar/(FGD)	3	1	2	1	Rp. 112.500.000	Telah terlaksana
Penataan Arsip Persidangan	Tertatanya Arsip Persidangan	1	-	-	-	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Penataan Arsip Bidang Administrasi	Tertatanya Arsip Bidang Administrasi	1	-	-	-	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Penataan Arsip Bidang Keuangan	Tertatanya Arsip Bidang Keuangan	1	-	-	-	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Penataan Arsip Bidang Kepegawaian	Tertatanya Arsip Bidang Kepegawaian	-	-	1	-	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Penataan Arsip Barang/Jasa	Tertatanya Arsip Barang/Jasa	1	-	-	-	Rp. 50.000.000	Telah terlaksana

Pada Triwulan III, dilakukan penyesuaian rencana aksi pada indikator Pelaksanaan Arsip Digital. Rencana aksi pemeliharaan mesin potong yang semula ditargetkan pada Triwulan III dilakukan penyesuaian sehingga kini target penyelesaian pada Triwulan IV. Kemudian rencana aksi sewa ruang arsip tiga kini dihapus karena terdapat perubahan kegiatan.

Di samping itu, rencana aksi lainnya yang ditargetkan pada Triwulan III telah terlaksana seluruhnya. Rencana aksi tersebut meliputi pemeliharaan *Mobile File (Roll O Pack)* yang telah terlaksana pada bulan September 2024, sewa ruang arsip satu, sewa ruang arsip dua, peningkatan kapasitas SDM yang terlaksana pada tanggal 18 s.d. 20 September 2024 dan

27 s.d. 29 September 2024, serta penataan arsip bidang kepegawaian yang juga telah terlaksana pada September 2024.

Pada saat bersamaan, Bagian Arsip selaku pelaksana indikator Pelaksanaan Digitalisasi Arsip sedang dalam proses pelaksanaan penyusutan arsip (penyerahan arsip statis ke ANRI dan pemusnahan arsip DPR RI). Progres pelaksanaan telah mencapai 25%. Proses awal pelaksanaan telah dilakukan dengan melakukan pengiriman surat permohonan verifikasi daftar arsip penyusutan DPR RI. Saat ini, Bagian Arsip sedang menunggu jawaban dari ANRI terkait permohonan daftar usul serah dan daftar usul musnah arsip DPR RI tahun 2024.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/qoqiwlaid9fBdfj>

12. Pelaksanaan Data Statistik Sektor: Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Penanggung Jawab
Badan Pusat Statistik	-	1,51	2,6	Pusat Teknologi Informasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Menyelaraskan data dengan Standar Data Statistik dan Data Induk/Kode Referensi	Data statistik sektoral yang dinilai telah sesuai dengan Standar Data Statistik Nasional dan Data Induk/Kode Referensi	-	2	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Melakukan dokumentasi setiap tahapan pengelolaan data meliputi perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data	Terdokumentasinya setiap tahapan pengelolaan data meliputi perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data	-	2	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Penyusunan prosedur pengelolaan data statistik sektoral	Disahkannya prosedur pengelolaan data statistik sektoral	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Melakukan pelatihan terkait pengelolaan data statistik sektoral	Terlaksananya pengembangan kompetensi SDM dalam bidang statistik sektoral yang diselenggarakan BPS	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Bimbingan teknis penggunaan Portal Satu Data DPR	Terlaksananya bimbingan teknis dengan Produsen Data dalam penggunaan Portal Satu Data DPR	-	1	-	-	Rp. 6.000.000	Telah terlaksana
Mengajukan rekomendasi kegiatan statistik sektoral kepada BPS	Setiap kegiatan statistik sektoral yang dinilai telah dilaporkan ke BPS untuk mendapatkan rekomendasi	1	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Pada indikator Pelaksanaan Data Statistik Sektoral, pelaksanaan rencana aksi seluruhnya telah terlaksana pada Triwulan I dan II. Untuk itu, tidak terdapat capaian pada Triwulan III.

13. Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa: Indeks Tata Kelola Pengadaan

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Penanggung Jawab
LKPP	9,9	47,18	72	Biro Umum

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Membuat surat edaran kepada para PPK untuk melakukan Pemanfaatan Sistem Pengadaan pada aplikasi SPSE	Surat Edaran Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1484/TI.04/1/204	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Pendampingan penginputan RUP Tahun 2024	Nota Dinas, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 15.000.000	Telah terlaksana
Pendampingan penginputan RUP Tahun 2024 dan Penyelesaian Pencatatan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023 pada aplikasi SPSE 4.5	Nota Dinas, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 5.000.000	Telah terlaksana
Koordinasi Penginputan RUP di Lingkungan Biro Umum	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 3.500.000	Telah terlaksana
Koordinasi Persiapan Evaluasi Penggunaan PDN dan UMK-Kop	Undangan Rapat dan Laporan Singkat	1	-	-	-	Rp. 10.000.000	Telah terlaksana
Konsultasi dengan LKPP tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 6.000.000	Telah terlaksana
Evaluasi Penginputan RUP dan Persiapan Pelaksanaan Penginputan RUP TA 2024 ke Aplikasi SIRUP	Pointer, Rekapitulasi Progress RUP Satker Sekretariat Jenderal dan Satker Dewan	1	-	-	-	Rp. 10.000.000	Telah terlaksana
Konsultasi dengan LKPP tentang Pemilihan Penyedia	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 15.000.000	Telah terlaksana
Koordinasi persiapan Pengumuman paket Pengadaan Barang/Jasa Tahun	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 25.758.745	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
2024 bersama dengan Deputi Administrasi dan Deputi Persidangan serta Pejabat Tinggi Pratama							
Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan <i>Parliamentary Meeting on The Occasion Of the 10th World Water Forum</i>	Undangan Rapat dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 5.000.000	Telah terlaksana
Finalisasi Penginputan RUP dengan Para PPK di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 5.000.000	Telah terlaksana
Finalisasi penginputan UP Tahun 2024 tanggal 5-6 Maret 2024 dengan mengundang para PPK dan PP di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI serta Deputi Bidang Administasi dan Narasumber dari LKPP	Undangan Rapat, Rekapitulasi <i>Progress</i> RUP dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 115.000.000	Telah terlaksana
Membuat Surat Klarifikasi atas Pagu Pengadaan yang harus diumumkan pada aplikasi SIRUP kepada LKPP	Surat Klarifikasi	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
FGD dengan para PPK dan PP dan mengundang Narasumber LKPP sehingga terlaksananya pengadaan barang/jasa melalui Katalog Sektoral	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 20.000.000	Telah terlaksana
Pendampingan pengisian E-Kontrak, E-Purchasing, E-Tendering, dan Non E-	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 10.000.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Tendering / Non E-Purchasing untuk Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2023 pada bulan Januari 2024							
Monitoring Proses Metode E-Purchasing sampai dengan tahapan selesai	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 3.500.000	Telah terlaksana
Pendampingan Teknis E-Purchasing kepada Para PPK	Undangan Rapat dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 78.000.000	Telah terlaksana
Pendampingan Teknis Tata Cara Perhitungan PDN dan TKDN dalam Praktik Pengadaan Barang/Jasa	Surat Tugas, Pointer dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 78.000.000	Telah terlaksana
Pendampingan untuk para PPK dan PP agar melakukan Pencatatan pada Aplikasi SPSE untuk proses pengadaan yang tidak dilakukan dengan metode <i>Tender</i> dan <i>Purchasing</i>	Undangan FGD, Laporan Singkat dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 3.500.000	Telah terlaksana
Monitoring pencatatan pada aplikasi SPSE untuk proses pengadaan yang tidak dilakukan dengan metode <i>Tender</i> dan <i>Purchasing</i> dan menginfokan para PPK dan PP untuk menyelesaikan proses pencatatannya	Undangan, Laporan Singkat dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 3.500.000	Telah terlaksana
Pelaksanaan <i>Tender</i> dari unit-unit kerja yang didampingi oleh JF PBJ dilakukan sampai dengan proses <i>Tender</i> selesai	<i>Screenshot</i> daftar paket pekerjaan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024	1	-	-	-	Rp. 3.500.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	dari web lpse.dpr.ri						
Mengingatkan kepada para PPK agar ada minimal 1 (satu) kegiatan pengadaan yang dilakukan dengan metode pembelian melalui katalog Bela Negara/Toko Daring	Laporan Singkat dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 3.500.000	Telah terlaksana
Pendampingan kepada para PPK dan PP melakukan proses <i>Tender</i> dilanjutkan dengan penyelesaiannya pada aplikasi E-Kontrak	Laporan singkat dan Foto kegiatan	1	-	-	-	Rp. 9.500.000	Telah terlaksana
Pendampingan kepada para PPK dan PPK untuk penyelesaian E-Kontrak sampai dengan selesai	Nota Dinas	1	-	-	-	Rp. 3.500.000	Telah terlaksana
Penelaahan Etalase Pencetakan Produk Elektronik Penerbitan	Nota Dinas dan Surat Keputusan Penetapan Hasil Penelaahan Produk	1	-	-	-	Rp. 3.500.000	Telah terlaksana
Penelaahan Etalase Produk Sarana Umum YANKES	Nota Dinas dan Surat Keputusan Penetapan Hasil Penelaahan Produk	1	-	-	-	Rp. 3.500.000	Telah terlaksana
Monitoring dan Evaluasi RUP sesuai Revisi Anggaran dan Pencatatan Realisasi Anggaran Tahun 2024	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	-	1	-	-	Rp. 7.000.000	Telah terlaksana
Pendampingan Pencatatan Realisasi Anggaran Tahun 2024	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	-	1	-	-	Rp. 7.000.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Pendampingan Pencatatan Realisasi Anggaran Tahun 2024 atas undangan Biro Persidangan I	Undangan Rapat dan Foto Kegiatan	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Pendampingan Pencatatan Realisasi Anggaran Tahun 2024 atas undangan Biro Kesekretariatan Pimpinan	Undangan Rapat dan Foto Kegiatan	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
FGD Tindak Lanjut Pemenuhan JF	Undangan Rapat dan Laporan Singkat	1	-	-	-	Rp. 25.000.000	Telah terlaksana
FGD strategi pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 dan Pendampingan Pengisian Si-Renaksi LKPP dengan mengundang narasumber dari LKPP	Undangan, Nota Dinas dan foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 60.000.000	Telah terlaksana
Membuat Surat perihal usulan pengangkatan JF PPBJ melalui perpindahan dari jabatan lain	Surat Keterangan B/178/KP.05.01/02/2024 tanggal 13 Februari 2024	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa	Surat Tugas dan Sertifikat	1	-	-	-	Rp. 15.000.000	Telah terlaksana
Koordinasi dalam rangka Pemenuhan JF	Undangan, Nota Dinas dan Foto Kegiatan	-	1	-	-	Rp. 3.500.000	Telah terlaksana
FGD dalam rangka tindak lanjut pemenuhan kebutuhan JF dan Pengelolaan SDM	Undangan, Nota Dinas dan Foto Kegiatan	-	1	-	-	Rp. 5.000.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Tindak Lanjut Rencana Aksi Pemenuhan JF	Nota Dinas	-	1	-	-	Rp. 2.090.000	Telah terlaksana
Percepatan Penerapan 17 Standard LPSE	Undangan dan Materi Bimbingan Teknis	-	1	-	-	Rp. 141.00.000	Telah terlaksana

Pada indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan, pelaksanaan rencana aksi seluruhnya telah terlaksana pada Triwulan I dan II. Untuk itu, tidak terdapat capaian pada Triwulan III.

14. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset:

a. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Penanggung Jawab
Kementerian Keuangan	93,66	94,26	96	Biro Keuangan dan Biro Perencanaan dan Organisasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penyediaan Aplikasi Monitoring IKPA	Pembangunan Aplikasi DigitAll melalui fitur IKPA dan fitur Rencana Penarikan Dana	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Terbitnya Instruksi Sekretaris Jenderal terkait Perjanjian Kinerja Capaian Nilai IKPA	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Terlaksananya sosialisasi dan	1	-	-	-	Rp. 52.100.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	bimbingan teknis Monitoring Nilai IKPA pada Aplikasi DigitAll						
	Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan teknis Monitoring Deviasi Halaman III DIPA pada aplikasi DigitAll	1	-	-	-	Rp. 90.792.000	Telah terlaksana
	Pemberian Penghargaan bagi Unit Kerja dengan Capaian IKPA tertinggi Per Triwulan	1	-	1	-	Rp. 297.690.000	Telah terlaksana
	Pembuatan Buku Saku terkait Tata Cara Panduan Monitoring Nilai IKPA dan Rencana Kegiatan	2	-	-	-	Rp. 15.000.000	Telah terlaksana

Pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), hanya terdapat satu kegiatan yang ditargetkan pada Triwulan III, yaitu Pemberian Penghargaan bagi Unit Kerja dengan Capaian IKPA tertinggi Per Triwulan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2024 yang diawali dengan pemaparan capaian nilai IKPA pada Satker Setjen dan Satker Dewan periode Semester I 2024. Pemberian penghargaan kemudian diberikan kepada 6 (enam) unit kerja dengan nilai tertinggi dengan masing-masing 3 (tiga) untuk Satker Setjen dan 3 (tiga) untuk Satker Dewan.

Pada Satker Setjen, Peringkat 1 diraih oleh Biro Perencanaan dan Organisasi, Peringkat 2 diraih oleh Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional, dan Peringkat 3 diraih oleh Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma. Sedangkan pada Satker Dewan, Peringkat 1 diraih oleh Biro Kesekretariatan Pimpinan, Peringkat 2 diraih oleh Biro Persidangan I, dan Peringkat 3 diraih oleh Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat.



Gambar 1.12 Evaluasi IKPA Semester I Tahun 2024

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/pirxe2gD6JeMsin>

b. Indeks Pengelolaan Aset (IPA)

<i>Leading Sector</i>	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Penanggung Jawab
Kementerian Keuangan	3,60	3,6	3,7	Biro Keuangan

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Monitoring penyelesaian tindaklanjut temuan BPK LKPP	Jumlah dokumen monitoring penyelesaian tindaklanjut temuan BPK LKPP	1	1	1	1	Rp. 25.000.000	Telah terlaksana
Monitoring realisasi PNBPN khususnya yang bersifat dari Pengelolaan BMN	Jumlah dokumen monitoring capaian PNBPN pengelolaan BMN	3	3	3	3	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Melakukan monitoring setiap triwulan terhadap seluruh dokumen persetujuan pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN sudah terinput kedalam Aplikasi SIMAN modul pengawasan dan pengendalian	Jumlah laporan monitoring tindak lanjut pengelolaan BMN	1	1	1	1	Rp. 15.000.000	Telah terlaksana
Melakukan pengajuan usulan penghapusan secara berkala	Jumlah laporan penghapusan per semester	-	1	-	1	Rp. 10.000.000	Telah terlaksana
Melakukan monitoring terhadap sisa BMN yang belum dilakukan PSP	Jumlah Laporan PSP Tanah dan/atau Gedung Bangunan	-	1	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana aksi penyelesaian tindak lanjut temuan BPK LKPP telah dilaksanakan oleh Biro Keuangan yang telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan melalui rekonsiliasi eksternal BMN Semester I 2024. Selanjutnya, rencana aksi monitoring realisasi PNBPN khususnya yang bersifat dari pengelolaan BMN yang belum terlaksana pada Triwulan II, telah terlaksana di Triwulan III. Rencana aksi dilaksanakan melalui koordinasi antara Biro Keuangan dengan unit kerja pengelola PNBPN (Bagian Pengelolaan Wisma) serta Kementerian Keuangan. Dalam koordinasi tersebut, rekonsiliasi internal serta penyampaian proyeksi dan realisasi PNBPN ke DJA untuk bulan Juli sampai dengan September 2024 telah dilakukan.

Kemudian untuk rencana aksi pelaksanaan monitoring setiap triwulan terhadap seluruh dokumen persetujuan pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN, telah diselenggarakan bimbingan teknis penggunaan Aplikasi SIMANv2 dan rekonsiliasi internal dengan memastikan bahwa seluruh dokumen persetujuan pengelolaan BMN telah ditindaklanjuti. Dalam hal ini, dilakukan koordinasi antara Biro Keuangan dengan Kementerian Keuangan (KPKNL Jakarta 1 dan Direktorat PKKN) sehingga implementasi SIMANv2 berjalan lancar.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/H6C5mogX6kcRmsf>

c. Opini BPK

<i>Leading Sector</i>	<i>Capaian 2022</i>	<i>Capaian 2023</i>	<i>Target 2024</i>	<i>Penanggung Jawab</i>
BPK	WTP	WTP	WTP	Biro Keuangan

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penguatan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	Sosialisasi pengisian Matriks Tabel A kepada seluruh unit kerja pemegang akun signifikan	1	-	-	-	Rp. 66.424.000	Telah terlaksana
	Sosialisasi dan Bimbingan teknis Kriteria Penetapan Akun Belanja Pemeliharaan dan Belanja Modal	1	-	-	-	Rp. 199.137.330	Telah terlaksana
Rekonsiliasi Internal dan Eksternal	Rekonsiliasi Internal Aset dan Persediaan Tiap Bulan	3	3	3	3	Rp. 353.300.000	Telah terlaksana
	Rekonsiliasi Eksternal Belanja dan Pendapatan Tiap Bulan	3	3	3	3	Rp. 0	Telah terlaksana
	Rekonsiliasi Eksternal Piutang atas Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai	-	1	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana aksi rekonsiliasi internal aset dan persediaan tiap bulan telah dilakukan oleh Bagian Administrasi Keuangan dan Bagian Administrasi BMN untuk Periode Semester I 2024. Rekonsiliasi dilakukan dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA 2024. Selanjutnya, untuk rencana aksi rekonsiliasi eksternal belanja dan pendapatan tiap bulan telah dilaksanakan oleh Penyusun Laporan Keuangan, Bendahara Penerimaan dan

KPPN Jakarta 7 untuk periode Juni 2024. Rekonsiliasi periode Juni dilakukan bersamaan dengan persiapan penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA 2024.



Gambar 1.13 Kegiatan Rekonsiliasi Internal atas Aset dan Persediaan

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/LLHJa2eXb9nKBPG>

d. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Penanggung Jawab
BPK	86,75%	94,44%	95%	Inspektorat Utama

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
<i>Entry meeting</i> Pemeriksaan BPK atas LK DPR TA 2024	Terlaksananya <i>entry meeting</i> Pemeriksaan BPK atas LK DPR TA 2024	1	-	-	-	Rp. 12.000.000	Telah terlaksana
Penyusunan Rekapitulasi Tanggapan Konsep Temuan BPK	Terlaksananya rapat koordinasi penyusunan rekapitulasi tanggapan konsep temuan BPK	-	1	-	-	Rp. 56.825.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	Tersedianya Rekapitulasi Tanggapan Konsep Temuan BPK	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Penyusunan Rekapitulasi Rencana Aksi Konsep LHP BPK	Tersedianya Rencana Aksi Konsep LHP BPK	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Penyusunan Rekapitulasi Tindak Lanjut 60 (enam puluh) hari LHP BPK	Terlaksananya rapat koordinasi penyusunan tindak lanjut 60 (enam puluh) hari temuan BPK	-	-	1	-	Rp. 10.000.000	Telah terlaksana
	Tersedianya Rencana Aksi 60 (enam puluh) hari	-	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Pemantauan TLHP BPK Semester I 2024	Rapat Koordinasi dengan unit kerja yang memiliki temuan BPK	-	1	-	-	Rp. 7.087.350	Telah terlaksana
	Tersedianya Matriks Pemantauan TLHP BPK Semester I 2024	-	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Rapat Koordinasi dengan BPK RI	-	-	1	-	Rp. 7.087.350	Telah terlaksana
Pemantauan TLHP BPK Semester II 2024	Rapat koordinasi dengan unit kerja yang memiliki temuan BPK	-	-	1	-	Rp. 5.000.000	Belum terlaksana. Kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	Tersedianya Matriks Pemantauan TLHP BPK Semester II 2024	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
	Rapat Koordinasi dengan BPK RI	-	-	-	1	Rp. 5.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Penyusunan TLHPKN Tim	Tersedianya SK Tim	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
<i>Benchmarking</i>	Tersedianya Laporan Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 109.983.000	Telah terlaksana

Rencana aksi pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan tindak lanjut 60 (enam puluh) hari temuan BPK telah dilaksanakan oleh Inspektorat Utama pada tanggal 19 Juli 2024. Pada kegiatan tersebut dilaksanakan penyampaian LHP BPK TA 2023 kepada unit kerja terkait, hal ini bertujuan agar unit kerja dapat mengetahui temuan/rekomendasi BPK yang harus ditindaklanjuti selama 60 (enam puluh) hari, yang akan berakhir pada tanggal 9 September 2024.

Selanjutnya, rencana aksi penyusunan rencana aksi 60 (enam puluh) hari telah dilaksanakan pada tanggal 15 dan 19 Agustus 2024 oleh Inspektorat Utama melalui Tim Pemantauan Inspektorat I. Rapat koordinasi tindak lanjut 60 (enam puluh) hari LHP BPK dan Pemantauan TLHP BPK Triwulan III dengan unit kerja terkait dengan tujuan untuk membantu dan mendampingi unit kerja dalam menyusun rencana aksi tindak lanjut 60 (enam puluh) hari dan memantau temuan BPK yang belum selesai sampai dengan Triwulan III 2024. Berdasarkan pelaksanaan dua rencana aksi di atas, mulai pada tanggal 9 September 2024, Inspektorat Utama melalui Bagian Administrasi Inspektorat Utama telah menyusun rekapitulasi tindak lanjut 60 (enam puluh) hari LHP BPK yang bersumber dari unit kerja terkait, yang kemudian diserahkan kepada BPK RI pada tanggal 13 September 2024.

Selanjutnya, Inspektorat Utama juga telah melaksanakan kegiatan penyusunan matriks pemantauan TLHP BPK Semester I 2024 pada rencana aksi pemantauan TLHP BPK Semester I 2024 yang kegiatan rapat koordinasinya telah dilaksanakan pada Triwulan II, tepatnya pada tanggal 3 s.d 5 Juni 2024. Pada Triwulan III, Inspektorat Utama melakukan penyusunan matriks pemantauan TLHP BPK Semester I 2024 dengan berkoordinasi kepada BPK RI melalui *entry meeting* pada tanggal 27 Juni 2024 untuk penyerahan bukti dukung TLHP Semester I 2024. Inspektorat Utama juga telah menerima penyerahan Hasil Pemantauan TLHP BPK Semester I 2024 pada tanggal 12 September 2024.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI sampai dengan Semester I 2024, Nomor 205/S/V/07/2024 Tahun 2024 pada DPR RI

tanggal 30 Juli 2024, Sekretariat Jenderal DPR RI telah mencapai presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan sebesar 95,12% yang terdiri dari 89,43% telah sesuai dengan rekomendasi (status 1) dan 5.69% tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan sah (status 4).

Dengan kata lain, Inspektorat Utama telah menindaklanjuti 33 (tiga puluh tiga) rekomendasi yang terdiri dari 10 (sepuluh) rekomendasi diajukan ke status 1 (selesai) dan 23 (dua puluh tiga) rekomendasi diajukan ke status 4 yaitu tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan sah. Hasil telaah BPK atas tindak lanjut tersebut, 3 (tiga) rekomendasi dinyatakan selesai dan sebanyak 7 (tujuh) rekomendasi belum sesuai rekomendasi dan masih proses tindak lanjut di semester selanjutnya dan sebanyak 23 (dua puluh tiga) rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah belum disetujui oleh Anggota BPK dikarenakan masih dalam proses telaah oleh BPK RI dan dilanjutkan pada semester selanjutnya.

Rincian atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI sampai dengan Semester I tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) rekomendasi sebesar Rp. 45.555.238.921,65 atau 89,43%;
- b. Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 30 (tiga puluh) rekomendasi sebesar Rp. 3.144.324.826,93 atau 4,88%;
- c. Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 35 rekomendasi sebesar Rp.15.070.241.887,03 yaitu 5,69%.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Sampai Semester I Tahun 2024 yang mencapai 95,12%, maka dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI telah melebihi target yang ditetapkan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Tahun 2024 yaitu sebesar 95%.

Namun untuk rencana aksi pemantauan TLHP BPK Semester II 2024, kegiatan rapat koordinasi dengan unit kerja yang memiliki temuan BPK belum dapat dilaksanakan dikarenakan laporan hasil pemantauan TLHP BPK Semester I 2024 baru diterima oleh Inspektorat Utama pada tanggal 12 September 2024, tanggal tersebut mundur dari tanggal seharusnya yaitu tanggal 30 Juli 2024. Hasil pemantauan dari BPK berisi rekomendasi BPK yang belum sesuai yang harus segera ditindaklanjuti oleh Sekretariat Jenderal DPR RI. Selanjutnya, kegiatan ini akan dilaksanakan pada Triwulan IV tahun 2024.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/pSq4S3Zj4kC72RB>

15. Penguatan Sistem Merit, Manajemen Talenta, Kinerja Pegawai dan Jabatan Fungsional

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Penanggung Jawab
KASN	345,5	363	363	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Update data talenta di SiMata	Laporan <i>update</i> data per semester	-	1	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Pemenuhan 20 JP pelatihan bagi setiap pegawai	Laporan pelaksanaan pelatihan per triwulan	1	1	1	1	Rp. 10.004.738.000	Telah terlaksana
Evaluasi berkala penerapan sistem merit	Laporan penerapan sistem merit per semester	-	1	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana aksi pemenuhan 20 (dua puluh) JP pelatihan bagi setiap pegawai telah dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif selaku PIC dengan indikator *output* laporan pelaksanaan pelatihan per triwulan. Pada periode Triwulan III, dapat disampaikan bahwa capaian penyelenggaraan pengembangan kompetensi periode Januari s.d. 17 September 2024 adalah sebagai berikut:

- Dari jumlah total PNS Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu 1.229 (seribu dua ratus dua puluh sembilan) PNS, terdapat 647 (enam ratus empat puluh tujuh) PNS atau sekitar 52,64% yang telah memperoleh pengembangan kompetensi 20 (dua puluh) JP atau lebih;
- Sejumlah 516 (lima ratus enam belas) PNS atau sekitar 41,99% dari total PNS Sekretariat Jenderal DPR RI mendapatkan pengembangan kompetensi di bawah 20 (dua puluh) JP;
- Sejumlah 66 (enam puluh enam) PNS atau sekitar 5,37% dari total PNS Sekretariat Jenderal DPR RI belum mendapatkan kesempatan pengembangan kompetensi.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/pX7xwZwgy8fSzcf>

16. Pelaksanaan Core Value ASN: Indeks BerAKHLAK

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Penanggung Jawab
KemenPANRB	60,7%	61,7%	75%	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Pelaksanaan Kuis dan Bangga Melayani Bangsa di Aplikasi SIRAJIN	Penyusunan Soal Kuis BerAKHLAK	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kuis BerAKHLAK	-	1	-	-	Rp. 5.000.000	Telah terlaksana
	Pengumuman Pelaksanaan Kuis BerAKHLAK	-	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kuis BerAKHLAK	-	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Penguatan nilai-nilai BerAKHLAK	Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Seminar Penguatan Core Value BerAKHLAK	-	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Kegiatan Seminar Penguatan Core Value BerAKHLAK	-	-	1	-	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Sosialisasi Panduan Core Value BerAKHLAK	Sosialisasi Pedoman Panduan Core Value BerAKHLAK di Portal DPR	-	1	-	-	Rp. 15.000.000	Telah terlaksana
Pemberian Penghargaan Pemenang BerAKHLAK	Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Pemenang Kuis BerAKHLAK	-	-	-	1	Rp. 5.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Rencana aksi pengumuman pelaksanaan Kuis BerAKHLAK telah terlaksana pada tanggal 29 Agustus 2024 bersamaan dengan upacara peringatan Hari Ulang Tahun DPR RI. Pada kesempatan tersebut, Kepala Pusat Analisis Keparlemenan dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur mewakili Sekretaris Jenderal DPR RI dalam pemberian penghargaan kepada pemenang Kuis BerAKHLAK.



Gambar 1.14 Pemberian Penghargaan Kepada Pemenang Kuis BerAKHLAK

Selanjutnya, rencana aksi penyusunan laporan pelaksanaan Kuis BerAKHLAK juga telah terlaksana yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif pada tanggal 20 Agustus 2024. Selanjutnya, rencana aksi rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan seminar penguatan *Core Value* BerAKHLAK dan kegiatan seminar penguatan *Core Value* BerAKHLAK telah terlaksana pada tanggal 25 September 2024 secara *online* melalui Zoom yang dihadiri oleh 400 (empat ratus) PNS.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/LrSYtqKoRtBR9t7>

17. Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima:
a. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

<i>Leading Sector</i>	<i>Capaian 2022</i>	<i>Capaian 2023</i>	<i>Target 2024</i>	<i>Penanggung Jawab</i>
Kementerian PANRB	82,757	93,13	93,25	Pusat Analisis Keparlemenan

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penyusunan Pedoman Survei di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang terintegrasi	Terbentuknya Tim Penyusun Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Tersusunnya Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Penguatan Standar Pelayanan	Tersusunnya kuesioner Reviu Standar Pelayanan	80	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Terlaksananya pendampingan Pengisian Kuesioner yang	80	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	diawali dengan Sosialisasi pengisian						
	Terlaksananya kegiatan pengisian survei	80	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Terlaksananya input data kuesioner survei yang telah diisi	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Terlaksananya pengolahan data kuesioner	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Tersusunnya Laporan Reviu Standar Pelayanan	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Implementasi Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terintegrasi	Tersusunnya Laporan Survei pada 13 (tiga belas) area sebagai awalan penggunaan pedoman Survei Terintegrasi		1			Rp. 0	Telah terlaksana
Penguatan Penyelenggaraan Survei	Pembuatan Surat Edaran/Peraturan Sekretaris Jenderal	-	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Pengembangan Aplikasi SKM untuk pengelolaan hasil survei terintegrasi	-	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Survei di	-	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	seluruh layanan Sekretariat Jenderal DPR RI						
Penyelenggaraan Survei terintegrasi, berkelanjutan, dan berkesinambungan	Terbentuknya Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Pedoman Penyelenggaraan Survei di lingkungan Kesekretariatan Jenderal DPR RI	-	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Pedoman Penyelenggaraan Survei di lingkungan Kesekretariatan Jenderal DPR RI secara terintegrasi, berkelanjutan, dan berkesinambungan	-	-	1	-	Rp. 52.290.000	Telah terlaksana
	Tersusunnya Laporan SKM Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024	-	-	5	-	Rp.0	Belum terlaksana. Kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Optimalisasi Evaluasi dan Tindak Lanjut SKM	Melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat	-	-	1	-	Rp. 0	Belum terlaksana. Kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI						
	Tersusunnya Laporan Rekomendasi atas Evaluasi Hasil SKM	-	-	1	-	Rp. 0	Belum terlaksana. Kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan IV
	Penyampaian Laporan dan Hasil Penilaian Kinerja Survei per unit kerja kepada Biro Perencanaan dan Organisasi sebagai salah satu pengukuran dalam Penilaian Kinerja	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Survei di seluruh layanan Sekretariat Jenderal DPR RI yang merupakan bagian dari rencana aksi penguatan penyelenggaraan survei telah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bagian PKORB secara *hybrid* dengan mengundang Eselon III dari beberapa Biro dan Eselon IV dari beberapa Pusat. Selanjutnya, kegiatan pembuatan Surat Edaran/Peraturan Sekretaris Jenderal pada rencana aksi yang sama juga telah terlaksana, ditandatangani oleh Kepala Pusat Analisis Keparlemenan selaku penyelenggara Survei Persepsi Masyarakat terhadap kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 6 September 2024.

Kemudian untuk rencana aksi pembentukan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Pedoman Penyelenggaraan Survei di lingkungan Kesekretariatan Jenderal DPR RI dan terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Pedoman Penyelenggaraan Survei di lingkungan Kesekretariatan Jenderal DPR RI secara terintegrasi, berkelanjutan, dan berkesinambungan, telah terlaksana baik secara *offline* bagi Anggota DPR RI dan *online* untuk pengguna layanan non Anggota DPR RI.

Selanjutnya, untuk pengembangan Aplikasi SKM untuk pengelolaan hasil survei terintegrasi telah terlaksana. Namun, dilakukan penyesuaian terhadap *output* dari kegiatan tersebut menjadi “1 (satu) Aplikasi atau Optimalisasi Gform” dikarenakan terdapat kendala teknis pada pengembangan aplikasi tersebut. Pada kegiatan ini, bukti dukung yang digunakan adalah *barcode* yang digunakan dalam pelaksanaan survei.

Sedangkan untuk rencana aksi tersusunnya Laporan SKM Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024, melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja

Sekretariat Jenderal DPR RI, dan tersusunnya Laporan Rekomendasi atas Evaluasi Hasil SKM belum dapat dilaksanakan pada Triwulan III dan akan dilaksanakan pada Triwulan IV.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/5koJgmKFAA6jqLg>

b. Indeks Pelayanan Publik

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Penanggung Jawab
Kementerian PANRB	4,31	4,40	4,51	Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Pembentukan Tim Pendampingan ULE dan Evaluator PEKPPP Mandiri Instansional	Dokumen Surat Tugas/SK Tim	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Rapat Kerja Persiapan PEKPPP 2024	Hasil Rapat dan Pembagian Tugas Tim	1	-	-	-	Rp. 1.540.000	Telah terlaksana
Melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP)	Tersedianya Laporan FKP	-	1	-	-	Rp. 35.375.000	Telah terlaksana
Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Tersedianya Laporan SKM	-	-	1	-	Rp. 52.290.000	Telah terlaksana
Pelaksanaan PEKPPP Mandiri Intansional	Tersedianya Laporan PEKPPP	-	-	1	-	Rp. 4.000.000	Telah terlaksana
Pelaporan PEKPPP ke Kementerian PANRB	Dokumen tanda terima pelaporan PEKPPP dari Kementerian PANRB	-	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil FKP dan SKM	Tersedianya dokumen RTL	-	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Pelaksanaan RTL	Capaian realisasi pelaksanaan RTL	-	-	-	100%	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
-----------------	-----------------------------------	---	---	---	------	-------	---

Rencana aksi pelaksanaan PEKPPP Mandiri Intansional telah terlaksana sesuai dengan *timline* yang telah disepakati. Per tanggal 9 Oktober 2024 kegiatan sedang dalam tahap Penilaian Mandiri. Selanjutnya rencana aksi pelaporan PEKPPP ke Kementerian PANRB telah terlaksana dengan bukti dukung Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Biro Umum, Kepala Bagian PKORB, dan Tim Evaluator Kementerian PANRB pada tanggal 27 Agustus 2024. Begitu pula dengan rencana aksi pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil FKP dan SKM pun telah terlaksana.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/WYnRqG7rpicc7Hn>

LAPORAN PELAKSANAAN RB TEMATIK TRIWULAN III TAHUN 2024

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkret RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. RB Tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* RB 2020–2024 setelah dilakukan penajaman dan dituangkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023. RB Tematik pada dasarnya merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintah (*debottlenecking*) yang menjadi isu strategis dan prioritas Pembangunan Nasional secara kolaboratif. Pelaksanaan RB Tematik dilakukan untuk mendorong percepatan RB yang kolaboratif dan efektif mengungkit capaian kinerja prioritas pembangunan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sasaran pelaksanaan RB Tematik dan indikatornya disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga. Namun pada dasarnya, RB Tematik dituangkan ke dalam 5 (lima) tema yang mendukung tujuan Pembangunan Nasional. Dalam hal ini, DPR RI memiliki intervensi yang penting untuk 5 (lima) tema RB Tematik, yaitu pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, peningkatan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan, dan peningkatan produk dalam negeri. Dalam melaksanakan intervensi tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI berperan sebagai sistem pendukung DPR RI. Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian.

Dalam hal ini, Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan dukungan keahlian berupa *scientific evidence* kepada DPR RI sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan dapat mendukung pencapaian prioritas Pembangunan Nasional. Dukungan tersebut berupa produk-produk analisis, kajian, ataupun Naskah Akademik yang dihasilkan oleh unit kerja di bawah Eselon 1 (Pusat) di lingkungan Badan Keahlian DPR RI. Dengan adanya dukungan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya Badan Keahlian DPR RI, tujuan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam 5 (lima) tema RB diharapkan akan tercapai.

Berikut ini adalah monitoring dan evaluasi atas rencana aksi RB Tematik Sekretariat Jenderal DPR RI beserta capaiannya pada Triwulan III Tahun 2024.

A. PROGRES CAPAIAN SASARAN TEMATIK, DAN INDIKATOR SASARAN TEMATIK TRIWULAN III TAHUN 2024

1. Pengentasan Kemiskinan

Dalam tema pengentasan kemiskinan, Sekretariat Jenderal DPR RI mengangkat isu terkait nelayan Indonesia yang menghadapi tantangan ekonomi serius, terutama di tengah ambisi pemerintah untuk menggenjot ekonomi biru. Meskipun Indonesia memiliki potensi laut yang luar biasa, kesejahteraan nelayan tradisional seringkali dikesampingkan. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan di kalangan nelayan, antara lain, modal yang lemah, permainan harga jual ikan, keterbatasan daya serap industri pengelolaan ikan, dominasi armada tangkap nelayan asing, dan

keterbatasan penguasaan pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, pemberdayaan nelayan skala kecil memiliki peran penting dalam mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, sasaran upaya pengentasan kemiskinan yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Tersirkulasinya hasil kajian tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan pemberdayaan nelayan sebagai bahan pertimbangan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kelautan;
- 2) Tersirkulasinya hasil kajian tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan pemberdayaan nelayan baik dari aspek peraturan perundang-undangan, pengawasan maupun anggaran.

Indikator dari sasaran tersebut adalah:

- 1) Tersampainya hasil kajian kepada Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) Kelautan;
- 2) Tersampainya hasil kajian kepada 15 (lima belas) AKD/Kementerian/Lembaga/Penguruan Tinggi.

Capaian sasaran dan indikator tema Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Jenderal DPR RI pada Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Pembentukan Tim Asistensi Pansus RUU Kelautan	Jumlah dokumen	1	-	-	-	Rp. 0	SDM	Telah terlaksana
Diskusi dengan pakar tentang sumber daya kelautan	Jumlah dokumen	-	2	-	-	Rp. 25.200.000	SDM	Telah terlaksana
Penyusunan kajian tentang pengelolaan sumber daya kelautan sebagai bahan pertimbangan pembahasan RUU tentang Kelautan	Jumlah dokumen	-	1	-	-	Rp. 51.435.000	Lain-lain	Telah terlaksana
Pendampingan dalam pembahasan Undang-Undang	Jumlah dokumen	-	-	1	1	Rp. 0	Lain-lain	Telah terlaksana
Pembentukan Tim Penguatan Analisis tentang Perikanan	Jumlah AKD/Kem enterian/L	1	-	-	-	Rp. 0	Lain-lain	Telah terlaksana

Terukur	embaga/P erguruan Tinggi/ <i>Stakeholder</i> terkait lainnya							
Diskusi dengan pakar/mitra MoU Badan Keahlian terkait kebijakan perikanan terukur	Jumlah AKD/Kementerian/L embaga/P erguruan Tinggi/ <i>Stakeholder</i> terkait lainnya	2	-	-	-	Rp. 25.200.000	Lain-lain	Telah terlaksana
Pengumpulan data ke daerah terkait kebijakan perikanan terukur	Jumlah AKD/Kementerian/L embaga/P erguruan Tinggi/ <i>Stakeholder</i> terkait lainnya	1	-	-	-	Rp. 34.300.000	Lain-lain	Telah terlaksana
Pembentukan Tim Penguatan Analisis tentang Pemberdayaan Nelayan	Jumlah AKD/Kementerian/L embaga/P erguruan Tinggi/ <i>Stakeholder</i> terkait lainnya	-	1	-	-	Rp. 0	SDM	Telah terlaksana
Diskusi dengan pakar/mitra MoU Badan Keahlian terkait pemberdayaan nelayan	Jumlah AKD/Kementerian/L embaga/P erguruan Tinggi/ <i>Stakeholder</i> terkait lainnya	-	1	-	-	Rp. 12.600.000	SDM	Telah terlaksana
Pengumpulan data ke daerah terkait pemberdayaan nelayan	Jumlah AKD/Kementerian/L embaga/P erguruan Tinggi/ <i>Stakeholder</i>	-	1	-	-	Rp. 34.300.000	Lain-lain	Telah terlaksana

	terkait lainnya							
Penyusunan kajian terkait sumber daya kelautan dan pemberdayaan nelayan, baik dalam laporan akhir maupun dalam produk-produk periodik	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/Stakeholder terkait lainnya	-	-	1	-	Rp. 51.435.000	Lain-lain	Telah terlaksana
Penyampaian hasil kajian kepada AKD/K/L Terkait, dan Perguruan Tinggi mitra Badan Keahlian DPR RI melalui <i>platform data sharing terintegrasi (cloud)</i>	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/Stakeholder terkait lainnya	-	-	-	15	Rp. 112.500.000	Pengawasan	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Rencana aksi pendampingan dalam pembahasan Undang-Undang telah terlaksana dalam bentuk Prosiding FGD “Tata Kelola Kelautan Dalam Menjaga Keberlangsungan Kehidupan Di Laut dan Keberlanjutan Pemanfaatan Sumber Daya Laut” pada tanggal 15 Mei 2024. Selanjutnya untuk rencana aksi penyusunan kajian terkait sumber daya kelautan dan pemberdayaan nelayan, baik dalam laporan akhir maupun dalam produk-produk periodik telah terlaksana yang dituangkan dalam Isu Sepekan Minggu Ke-1 September (2 s.d. 8 September 2024) dengan judul “Penguatan Upaya Pelindungan Kesejahteraan Nelayan Kecil Indonesia” dan Isu Sepekan Minggu Ke-2 September (9 s.d. 15 September 2024) dengan judul “Polemik Ekspor Pasir Laut”.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/ir67LBBBC5KKcGt>

2. Peningkatan Investasi

Dalam tema peningkatan investasi, Sekretariat Jenderal DPR RI memahami bahwa salah satu *intangible asset* perekonomian yang dapat menopang perekonomian nasional kedepan adalah sektor pariwisata. Namun, sektor pariwisata Indonesia masih relatif tertinggal dengan negara sekawasan yang menempatkan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan perekonomian, seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura. Salah satu penyebab ketertinggalan tersebut adalah rendahnya investasi sektor pariwisata. Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, sasaran upaya peningkatan investasi yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Tersusunnya norma yang berkaitan dengan penguatan investasi di sektor pariwisata dalam naskah akademik dan RUU;
- 2) Tersirkulasinya hasil kajian tentang determinan rendahnya investasi di sektor pariwisata baik dari aspek peraturan perundang-undangan maupun anggaran.

Indikator dari sasaran tersebut adalah:

- 1) Tersusunnya norma penguatan investasi di sektor pariwisata;
- 2) Tersampainya hasil kajian kepada 15 (lima belas) AKD/Kementerian/Lembaga/Penguruan Tinggi.

Capaian sasaran dan indikator tema Peningkatan Investasi Sekretariat Jenderal DPR RI pada Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Pembentukan Tim Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah naskah Akademik dan RUU	1	-	-	-	Rp. 0	SDM	Telah terlaksana
Penyusunan naskah akademik dan RUU	Jumlah naskah Akademik dan RUU	-	1	1	-	Rp. 102.870.000	Lain-lain	Telah terlaksana
Penyampaian naskah akademik dan RUU kepada Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah naskah Akademik dan RUU	-	-	-	15	Rp. 3.000.000	Lain-lain	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Pembentukan Tim Penyusun Kajian	Jumlah AKD/Kem enterian/L embaga/ Perguruan Tinggi	1	-	-	-	Rp. 0	SDM	Telah terlaksana
Pemetaan determinan rendahnya investasi dan dukungan anggaran sektor pariwisata	Jumlah AKD/Kem enterian/L embaga/ Perguruan Tinggi	-	1	-	-	RP. 51.435.000	Lain-lain	Telah terlaksana
Diskusi dengan pakar/mitra MoU Badan Keahlian terkait determinan rendahnya investasi dan dukungan anggaran sektor pariwisata	Jumlah AKD/Kem enterian/L embaga/ Perguruan Tinggi	-	3	-	-	Rp. 19.350.000	SDM	Telah terlaksana

Penyusunan kajian terkait penyelesaian permasalahan rendahnya investasi dan dukungan anggaran sektor pariwisata	Jumlah AKD/Kem enterian/L embaga/ Perguruan Tinggi	-	-	1	-	Rp. 100.424.000	Lain-lain	Telah terlaksana
Rapat koordinasi dengan Biro Persidangan I terkait pelaksanaan sirkulasi kajian	Jumlah AKD/Kem enterian/L embaga/ Perguruan Tinggi	-	-	1	-	Rp.3.000.000	Lain-lain	Telah terlaksana
Penyampaian kajian kepada AKD/K/L Terkait, dan Perguruan Tinggi mitra Badan Keahlian DPR RI melalui <i>platform data sharing</i> terintegrasi (<i>cloud</i>)	Jumlah AKD/Kem enterian/L embaga/ Perguruan Tinggi	-	-	-	15	Rp. 112.500.000	Pengawas an	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Rencana aksi penyusunan kajian terkait penyelesaian permasalahan rendahnya investasi dan dukungan anggaran sektor pariwisata telah terlaksana dan tertuang dalam Ringkasan Eksekutif dengan judul “Urgensi Penguatan Daya Saing Pariwisata Untuk Meningkatkan Perekonomian Nasional dan Dukungan Anggaran”. Selanjutnya, rencana aksi rapat koordinasi dengan Biro Persidangan I terkait pelaksanaan sirkulasi kajian telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2024 di Ruang Rapat BAKN DPR. Kemudian rencana aksi penyusunan naskah akademik dan RUU juga telah terlaksana sesuai dengan waktu dan target yang telah ditentukan.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/WygZJQD72nCN6zB>

3. Pengendalian Inflasi

Dalam tema pengendalian inflasi, Sekretariat Jenderal DPR RI memahami bahwa inflasi di Indonesia cenderung dipengaruhi oleh *Volatile Food* yang mayoritas dipenuhi dari impor (komoditas pangan dan hortikultura) akibat ketidakseimbangan produksi dan konsumsi. Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, sasaran upaya pengendalian inflasi yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2024 adalah tersirkulasinya hasil kajian dalam proses pembahasan anggaran dan pengawasan terkait pengendalian inflasi, khususnya upaya mengatasi ketidakseimbangan produksi dan konsumsi komoditas pangan dan hortikultura. Indikator dari sasaran tersebut adalah tersampainya hasil kajian kepada 15 (lima belas) AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi.

Capaian sasaran dan indikator tema Pengendalian Inflasi Sekretariat Jenderal DPR RI pada Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Pembentukan Tim Penyusun Kajian	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/ <i>Stakeholder</i> terkait lainnya	1	-	-	-	Rp. 0	SDM	Telah terlaksana
Pemetaan determinan ketidakseimbangan produksi dan konsumsi	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/ <i>Stakeholder</i> terkait lainnya	1	-	-	-	Rp. 51.435.000	Lain-lain	Telah terlaksana
Diskusi dengan pakar/mitra MoU Badan Keahlian terkait determinan ketidakseimbangan produksi dan konsumsi	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/ <i>Stakeholder</i> terkait lainnya	-	2	-	-	Rp. 14.400.000	SDM	Telah terlaksana
Penyusunan kajian terkait penyelesaian permasalahan ketidakseimbangan produksi dan konsumsi dalam rangka pengendalian inflasi	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/ <i>Stakeholder</i> terkait lainnya	-	1	-	-	Rp. 150.930.000	Lain-lain	Telah terlaksana
Rapat koordinasi dengan Biro Persidangan I dan Biro Persidangan II terkait	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/	-	-	1	-	Rp. 3.000.000	Lain-lain	Telah terlaksana

pelaksanaan sirkulasi kajian	Perguruan Tinggi/ <i>Stakeholder</i> terkait lainnya							
Penyampaian kajian kepada AKD/K/L Terkait, dan Perguruan Tinggi mitra Badan Keahlian DPR RI melalui <i>platform data sharing</i> terintegrasi (<i>cloud</i>)	Jumlah AKD/Kem enterian/L embaga/ Perguruan Tinggi/ <i>Stakeholder</i> terkait lainnya	-	-	15	-	Rp. 112.500.000	Pengawasa n	Telah terlaksana

Rencana aksi rapat koordinasi dengan Biro Persidangan I dan Biro Persidangan II terkait pelaksanaan sirkulasi kajian telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2024 di Ruang Rapat BAKN DPR. Selanjutnya, rencana aksi penyampaian kajian kepada AKD/K/L Terkait, dan Perguruan Tinggi mitra Badan Keahlian DPR RI melalui *platform data sharing* terintegrasi (*cloud*) telah terlaksana dengan judul “Upaya Mengatasi Ketidakseimbangan Produksi dan Konsumsi Komoditas Pangan Dalam Upaya Pengendalian Inflasi”.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/2to8DAQd7TNJ8R6>

4. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

Dalam tema pengendalian inflasi, Sekretariat Jenderal DPR RI memahami bahwa capaian predikat penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada 621 (enam ratus dua puluh satu) Instansi Pusat dan Daerah tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2024 masih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan SPBE masih dihadapkan pada berbagai hambatan. Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, sasaran upaya digitalisasi administrasi pemerintah yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2024 adalah tersirkulasinya hasil kajian hambatan pelaksanaan SPBE. Indikator dari sasaran tersebut adalah tersampainya hasil kajian kepada 18 (delapan belas) AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi.

Capaian sasaran dan indikator tema Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Sekretariat Jenderal DPR RI pada Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Fokus intervensi	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Pembentukan Tim Penyusun Kajian	Jumlah AKD/Kem enterian/L embaga/	1	-	-	-	Rp. 0	SDM	Telah terlaksana

	Perguruan Tinggi							
Pengumpulan data dan informasi secara primer dan sekunder	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi	1	-	-	-	Rp. 68.800.000	Lain-lain	Telah terlaksana
Diskusi dengan pakar/mitra MoU Badan Keahlian	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi	-	1	-	-	Rp. 8.400.000	Lain-lain	Telah terlaksana
Penyusunan kajian terkait hambatan pelaksanaan SPBE	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi	-	1	-	-	Rp. 4.500.000	Lain-lain	Telah terlaksana
Rapat koordinasi dengan Biro Persidangan I dan Biro Persidangan II terkait pelaksanaan sirkulasi kajian	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi	-	-	1	-	Rp. 3.000.000	Lain-lain	Telah terlaksana
Penyampaian kajian kepada AKD/K/L Terkait, dan Perguruan Tinggi mitra Badan Keahlian DPR RI melalui <i>platform data sharing</i> terintegrasi (<i>cloud</i>)	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi	-	-	18	-	Rp. 135.00.000	Pengawasan	Telah terlaksana

Rencana aksi rapat koordinasi dengan Biro Persidangan I dan Biro Persidangan II terkait pelaksanaan sirkulasi kajian telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2024 di Ruang Rapat BAKN DPR. Selanjutnya, rencana aksi penyampaian kajian kepada AKD/K/L Terkait, dan Perguruan Tinggi mitra Badan Keahlian DPR RI melalui *platform data sharing* terintegrasi (*cloud*) juga telah terlaksana sesuai dengan waktu dan target yang telah ditentukan.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/dnfG74A2gPRnbyH>

5. Penggunaan Produk Dalam Negeri

Dalam tema penggunaan produk dalam negeri, Sekretariat Jenderal DPR RI memahami bahwa perlunya penggunaan anggaran belanja barang/jasa untuk meningkatkan penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam

negeri minimal 40%. Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, sasaran upaya digitalisasi administrasi pemerintah yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2024 adalah terealisasinya anggaran belanja barang/jasa minimal 40% untuk meningkatkan penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Indikator dari sasaran tersebut adalah penggunaan produk dalam negeri sebesar 40%.

Capaian sasaran dan indikator tema Penggunaan Produk Dalam Negeri Sekretariat Jenderal DPR RI pada Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI	Persentase penggunaan produk dalam negeri	1	-	-	-	Rp. 0	Lain-lain	Telah terlaksana
Pelaksanaan anggaran belanja barang/jasa untuk penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri minimal 40%	Persentase penggunaan produk dalam negeri	1	1	1	1	Rp. 9.000.000	Lain-lain	Telah terlaksana

Rencana aksi pelaksanaan anggaran belanja barang/jasa untuk penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri minimal 40% telah dilaksanakan secara berkala. Realisasi transaksi belanja PDN per 9 September 2024 telah mencapai 81,22 %.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/cEDq5f9wfYTanKN>

**LAPORAN HASIL EVALUASI INTERNAL
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2024
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, evaluasi internal pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) perlu dilakukan untuk memastikan *Roadmap* dan Rencana Aksi RB berisi solusi dalam pemecahan masalah tata kelola atas isu yang ada di Sekretariat Jenderal DPR RI, memiliki kualitas yang baik, dan layak dijadikan pedoman dalam pelaksanaan RB. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan RB di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Sehubungan dengan hal tersebut, evaluator internal Sekretariat Jenderal DPR RI telah melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan RB di Sekretariat Jenderal DPR RI. Mekanisme pelaksanaan Evaluasi Internal RB dilakukan terhadap Evaluasi Pelaksanaan (*on-going*) dengan mempelajari dan menelaah pelaksanaan rencana aksi untuk mendapatkan informasi mengenai ketepatan pelaksanaan komponen kegiatan dibandingkan dengan maksud kegiatan yang disepakati ketika penyusunan rencana aksi, ketercapaian *output* kegiatan pada setiap triwulan, kualitas pelaksanaan kegiatan (manajemen/pengelolaan kegiatan), dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang telah ditetapkan dalam rencana aksi.

Dari 25 (dua puluh lima) indikator yang menjadi penilaian dalam evaluasi internal terdapat 1 (satu) indikator yaitu “Indeks Kualitas Kebijakan Publik” (IKK) yang dikecualikan karena Kementerian PANRB tidak melaksanakan kegiatan penilaian terhadap Indeks Kualitas Kebijakan Publik di Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2023 berdasarkan Surat Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/13464/OT.05.02/11/2023 yang ditujukan kepada Kementerian PANRB, dan Surat Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/12387/OT.05.01/10/2023 yang ditujukan kepada Deputy Bidang Kajian dan Kebijakan Inovasi LAN RI, serta Surat Tanggapan IKK dari LAN RI Nomor 3845/D.1/HKM.02.2. Selain itu terdapat 2 (dua) indikator yaitu “Penataan Jabatan Fungsional” dan “Pengelolaan Kinerja ASN” yang telah menjadi bagian dari indikator “Indeks Sistem Merit”. Dengan demikian jumlah indikator yang menjadi penilaian di Sekretariat Jenderal DPR RI adalah 22 (dua puluh dua) indikator.

Dalam pelaksanaan evaluasi internal, evaluator internal melibatkan lini kedua yaitu Bagian PKORB sebagai unit yang berkontribusi di dalam pengelolaan RB di Sekretariat Jenderal DPR RI dan dalam mendapatkan informasi mengenai evaluasi *on-going*.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan dan disampaikan melalui Surat Nomor: B/678/PI.03/09/2024 pada tanggal 30 September 2024, hasil evaluasi internal RB di Sekretariat Jenderal DPR RI adalah sebagai berikut:

A. HASIL EVALUASI INTERNAL *ON-GOING* TRIWULAN III TAHUN 2024

I. CATATAN

A. KETERCAPAIAN TARGET RENCANA AKSI (<i>OUTPUT</i> DAN WAKTU)			
NO.	AKSI	CATATAN (<i>OUTPUT</i>)	CATATAN (WAKTU)
1.	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Belum terdapat pelaksanaan aksi berdasarkan rencana aksi yang dilaksanakan pada Triwulan III	Belum terdapat pelaksanaan aksi berdasarkan rencana aksi yang dilaksanakan pada Triwulan III
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN: Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan III	Seluruh aksi telah dilaksanakan pada Triwulan III
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional: Indeks SPBE	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan III	Seluruh aksi telah dilaksanakan pada Triwulan III
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi: Nilai SAKIP	Terdapat 4 (empat) rencana aksi yang telah dilaksanakan pada Triwulan III, namun terdapat 3 (tiga) rencana aksi yang pelaksanaannya mundur ke Triwulan IV	Terdapat 3 (tiga) rencana aksi yang pelaksanaannya mundur ke Triwulan IV
5.	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja: Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Terdapat 1 (satu) rencana aksi yang seharusnya dilaksanakan pada Triwulan III, mundur ke Triwulan IV karena s.d. 24 September 2024 pelaksanaan Evaluasi ZI masih dilakukan oleh TPN Kementerian PANRB	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat 1 (satu) rencana aksi yang seharusnya dilaksanakan pada Triwulan III, mundur ke Triwulan IV karena s.d. 24 September 2024 pelaksanaan Evaluasi ZI masih dilakukan oleh TPN Kementerian PANRB; Terdapat 3 (tiga) rencana aksi yang seharusnya dilaksanakan di Triwulan II, baru dilaksanakan di Triwulan III
6.	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian	Terdapat 3 (tiga) rencana aksi di Triwulan III, namun hanya 1 (satu) rencana aksi yang	Terdapat 3 (tiga) rencana aksi di Triwulan III, namun hanya 1 (satu) rencana aksi yang terlaksana, sedangkan 2

	Intern Pemerintah: Tingkat Maturitas SPIP	terlaksana dan telah tercapai <i>output</i> , sedangkan 2 (dua) rencana aksi lain pelaksanaannya mundur ke Triwulan IV dikarenakan masih diperlukannya koordinasi dengan Bagian PKORB	(dua) rencana aksi pelaksanaannya mundur ke Triwulan IV dikarenakan masih diperlukannya koordinasi dengan Bagian PKORB
7.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan III	Seluruh aksi telah dilaksanakan pada Triwulan III
8.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei Penilaian Integritas (SPI)	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 3 (tiga) dari total 7 (tujuh) rencana aksi yang telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan III; • Terdapat 1 (satu) dari total 7 (tujuh) rencana aksi yang belum didukung dengan data dukung yang lengkap untuk menjawab ketercapaian <i>output</i> pada Triwulan III, yaitu "Mengikutsertakan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dalam pelatihan <i>e-Learning</i> KPK terkait Anti Korupsi dan Integritas 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 3 (tiga) dari total 7 (tujuh) rencana aksi yang seharusnya dilaksanakan pada Triwulan III, namun ditunda ke Triwulan IV; • Terdapat 4 (empat) dari total 7 (tujuh) rencana aksi yang seharusnya dilaksanakan pada Triwulan II, namun realisasi pelaksanaannya pada Triwulan III
9.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan: Indeks Reformasi Hukum	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan III	Pelaksanaan seluruh rencana aksi telah sesuai dengan target waktu pelaksanaan
10.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Terdapat 2 (dua) dari total 3 (tiga) rencana aksi yang telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan III	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 1 (satu) dari total 3 (tiga) rencana aksi yang seharusnya dilaksanakan pada Triwulan III, namun ditunda ke Triwulan IV; • Terdapat 1 (satu) dari total 3 (tiga) rencana aksi yang

			<p>seharusnya dilaksanakan pada Triwulan III, namun telah dilaksanakan lebih awal yaitu pada Triwulan II;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 1 (satu) dari total 3 (tiga) rencana aksi sesuai dengan target waktu pelaksanaan
11.	Pelaksanaan Arsip Digital: Kualitas Pengelolaan Arsip Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip	<p>Terdapat 3 (tiga) dari total 5 (lima) rencana aksi yang telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan III, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan <i>Mobile File (Roll O Pack)</i>; 2. <i>Workshop/</i> Bimbingan teknis <i>/Seminar/Focus Group Discussion</i> (FGD); 3. Penataan Arsip Bidang Kepegawaian 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 2 (dua) dari total 5 (lima) rencana aksi yang seharusnya dilaksanakan pada Triwulan III, namun data dukung belum menggambarkan waktu dan tanggal pelaksanaan kegiatan sehingga tidak dapat di analisis kesesuaian pelaksanaan aksi dengan waktu yang sudah direncanakan pada data dukung berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan <i>Mobile File (Roll O Pack)</i>; 2. Penataan Arsip Bidang Kepegawaian • Terdapat 2 (dua) dari total 5 (lima) rencana aksi yang seharusnya dilaksanakan pada Triwulan III, namun data dukung belum dilampirkan karena SPK masih dalam proses tanda tangan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sewa Ruang Arsip Satu; 2. Sewa Ruang Arsip Dua; 3. Terdapat 1 (satu) dari total 5 (lima) rencana aksi telah sesuai dengan target waktu pelaksanaan
12.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa: Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan III	Seluruh aksi telah dilaksanakan pada Triwulan III

13.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan III	Seluruh aksi telah dilaksanakan pada Triwulan III
14.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indeks Pengelolaan Aset	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan III	Seluruh aksi telah dilaksanakan pada Triwulan III
15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Opini BPK	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan III	Seluruh aksi telah dilaksanakan pada Triwulan III
16.	Penguatan Sistem Merit: Indeks Sistem Merit	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan III	Seluruh aksi telah dilaksanakan pada Triwulan III
17.	Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN: Indeks BerAkhlak	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan III	Seluruh aksi telah dilaksanakan pada Triwulan III
18.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral: Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Belum terdapat pelaksanaan aksi berdasarkan rencana aksi yang dilaksanakan pada Triwulan III	Belum terdapat pelaksanaan aksi berdasarkan rencana aksi yang dilaksanakan pada Triwulan III
19.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Survei Kepuasan Masyarakat	Kuantitas data dukung yang dibutuhkan pada setiap indikator telah terpenuhi. Indikator <i>output</i> “Pengembangan Aplikasi SKM untuk pengelolaan hasil survei terintegrasi” dialihkan menjadi penggunaan <i>barcode</i> dan <i>googledrive</i> , mengingat adanya kendala teknis pada aplikasi tersebut sehingga <i>output</i> yang dihasilkan berdasarkan rencana aksi terbaru adalah “1 Aplikasi atau Optimalisasi Gform” dengan bukti dukung <i>barcode</i> yang digunakan dalam rangka pengisian survei	Berdasarkan laporan <i>progress</i> rencana aksi, terkait Laporan Survei Kepuasan Masyarakat dan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 serta tindak lanjutnya, akan ditargetkan untuk terealisasi pada Triwulan IV. Kegiatan sosialisasi tindak lanjut akan dilaksanakan pada akhir tahun, sebagai langkah awal perbaikan di tahun 2025. Adapun <i>cut off</i> terhadap pengolahan data yang dilakukan akan ditargetkan pada tanggal 10 Desember 2024 untuk selanjutnya diserahkan kepada Kementerian PANRB pada 14 Desember 2024

		<p>Berdasarkan laporan <i>progress</i> rencana aksi, <i>output</i> terkait Laporan Survei Kepuasan Masyarakat dan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 serta tindak lanjutnya, akan ditargetkan untuk terealisasi pada Triwulan IV. Kegiatan sosialisasi tindak lanjut akan dilaksanakan pada akhir tahun, sebagai langkah awal perbaikan di tahun 2025. Adapun <i>cut off</i> terhadap pengolahan data yang dilakukan akan ditargetkan pada tanggal 10 Desember 2024 untuk selanjutnya diserahkan kepada Kementerian PANRB pada 14 Desember 2024</p>	
20.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Indeks Pelayanan Publik	<p>Ketercapaian <i>output</i> Pelaksanaan PEKPPP Mandiri Instansional di Triwulan III belum dituangkan dalam bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam rencana aksi karena untuk saat ini pelaksanaan PEKPPP Instansional masih dalam tahap persiapan karena memprioritaskan penilaian PEKPPP Nasional</p>	<p>PEKPPP Mandiri Instansional ditargetkan untuk selesai Triwulan IV. Untuk saat ini pelaksanaan PEKPPP Instansional masih dalam tahap persiapan karena memprioritaskan penilaian PEKPPP Nasional</p>
21.	Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE	<p>Kuantitas data dukung yang dibutuhkan pada setiap indikator telah terpenuhi. Namun, berdasarkan laporan <i>progress</i> pelaksanaan aksi Triwulan III, penyusunan Arsitektur SPBE To-Be DPR RI, <i>gap analysis</i> dan penyusunan Peta</p>	<p>Keseluruhan kegiatan yang mendukung pelaksanaan aksi telah dilaksanakan pada Triwulan III. Namun, berdasarkan laporan <i>progress</i> pelaksanaan aksi Triwulan III, penyusunan Arsitektur SPBE To-Be DPR RI, <i>gap analysis</i> dan penyusunan Peta Rencana SPBE akan dilakukan pada</p>

		Rencana SPBE akan dilakukan pada Triwulan IV, setelah penyusunan pada salah satu modul RITIK 2025-2027 selesai sehingga bukti dukung yang bisa dilampirkan masih berupa laporan singkat terkait rapat koordinasi yang mengawali pelaksanaan aksi tersebut sebagaimana terlampir pada bukti dukung di Triwulan II	Triwulan IV, setelah penyusunan pada salah satu modul RITIK 2025-2027 selesai. Namun, atas pergeseran <i>timeline</i> pelaksanaan aksi tersebut telah dilakukan pembaharuan terhadap rencana aksi
22.	Indeks Perencanaan Pembangunan	Belum terdapat <i>output</i> yang dihasilkan. Berdasarkan laporan <i>progress</i> rencana aksi, kegiatan penyusunan dokumen penyesuaian Perjanjian Kinerja 2024 belum dilaksanakan dikarenakan sampai dengan Triwulan III ini belum ada urgensi untuk melakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja TA 2024	Berdasarkan laporan <i>progress</i> rencana aksi, kegiatan penyusunan dokumen penyesuaian Perjanjian Kinerja 2024 belum dilaksanakan dikarenakan sampai dengan Triwulan III ini belum ada urgensi untuk melakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja TA 2024

B. KUALITAS KEGIATAN TERHADAP EKSPEKTASI RENCANA AKSI RB		
NO.	AKSI	CATATAN
1.	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Belum terdapat pelaksanaan aksi berdasarkan rencana aksi yang dilaksanakan pada Triwulan III
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN: Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	Terdapat 1 (satu) rencana aksi yang dilaksanakan pada Triwulan III yang telah dilengkapi dengan data dukung yang menggambarkan pelaksanaan aksi setiap indikator <i>output</i> sesuai dengan yang ditetapkan dalam rencana aksi
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional: Indeks SPBE	Dari 5 (lima) rencana aksi di Triwulan III, masih terdapat 4 (empat) rencana aksi yang belum terdapat penjelasan penggunaan anggaran pada laporan <i>progress</i> Triwulan III
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi: Nilai SAKIP	Terdapat 4 (empat) rencana aksi yang telah dilaksanakan di Triwulan III dan telah dilengkapi dengan data dukung yang menggambarkan pelaksanaan aksi setiap

		indikator <i>output</i> sesuai dengan yang ditetapkan dalam rencana aksi, namun terdapat juga 3 (tiga) rencana aksi yang pelaksanaannya mundur ke Triwulan IV
5.	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja: Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 1 (satu) rencana aksi yang seharusnya dilaksanakan pada Triwulan III, mundur ke Triwulan IV dikarenakan s.d 24 September 2024 pelaksanaan evaluasi ZI masih dilakukan oleh TPN Kementerian PANRB; • Terdapat 3 (tiga) rencana aksi yang baru dilaksanakan di Triwulan III (mundur dari Triwulan II)
6.	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Tingkat Maturitas SPIP	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 3 (tiga) rencana aksi di Triwulan III, namun hanya 1 (satu) rencana aksi yang dilaksanakan pada Triwulan III dan telah dilengkapi dengan data dukung yang menggambarkan pelaksanaan aksi indikator <i>output</i> sesuai dengan yang ditetapkan dalam rencana aksi yaitu: Memantau dan mengoptimalkan tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK untuk meminimalkan terjadinya temuan berulang, temuan terkait pengelolaan BMN, dan temuan terkait ketaatan. • Sedangkan pelaksanaan 2 (dua) rencana aksi lainnya mundur ke Triwulan IV dikarenakan masih dilakukan koordinasi dengan Bagian PKORB; • Terdapat 1 (satu) rencana aksi dari Triwulan II yang dilaksanakan pada Triwulan III dan telah dilengkapi dengan data dukung yang menggambarkan pelaksanaan aksi indikator <i>output</i> sesuai dengan yang ditetapkan dalam rencana aksi yaitu: Melaksanakan PM dan PK SPIP Terintegrasi secara substansi dan prosedur penilaian mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.
7.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Seluruh indikator di Triwulan III telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya

8.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei Penilaian Integritas (SPI)	Seluruh rencana aksi telah dilengkapi dengan data dukung yang menggambarkan pelaksanaan aksi setiap indikator <i>output</i> sesuai dengan yang ditetapkan dalam rencana aksi
9.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan: Indeks Reformasi Hukum	Seluruh rencana aksi telah dilengkapi dengan data dukung yang menggambarkan pelaksanaan aksi setiap indikator <i>output</i>
10.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Terdapat 2 (dua) dari total 3 (tiga) rencana aksi telah dilengkapi dengan data dukung yang menggambarkan pelaksanaan aksi setiap indikator <i>output</i> sesuai dengan yang ditetapkan dalam rencana aksi dan 1 (satu) rencana aksi ditunda ke Triwulan IV
11.	Pelaksanaan Arsip Digital: Kualitas Pengelolaan Arsip Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip	Terdapat 3 (tiga) dari total 5 (lima) rencana aksi telah dilengkapi dengan data dukung yang menggambarkan pelaksanaan aksi setiap indikator <i>output</i> sesuai dengan yang ditetapkan dalam rencana aksi yaitu: 1. Pemeliharaan <i>Mobile File (Roll O Pack)</i> ; 2. <i>Workshop/</i> Bimbingan teknis <i>/Seminar/Focus Group Discussion (FGD)</i> ; 3. Penataan Arsip Bidang Kepegawaian.
12.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa: Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan III telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya
13.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan III telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya
14.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indeks Pengelolaan Aset	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan III telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya
15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Opini BPK	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan III telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya
16.	Penguatan Sistem Merit: Indeks Sistem Merit	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan III telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya
17.	Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN: Indeks BerAkhlak	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan III telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya
18.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral: Tingkat Kematangan	Belum terdapat pelaksanaan aksi berdasarkan rencana aksi yang dilaksanakan pada Triwulan III

	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
19.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Survei Kepuasan Masyarakat	Bukti dukung terkait setiap indikator telah menggambarkan pelaksanaan aksi sesuai dengan yang ditetapkan dalam rencana aksi
20.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Indeks Pelayanan Publik	Bukti dukung terkait setiap indikator telah menggambarkan pelaksanaan aksi sesuai dengan yang ditetapkan dalam rencana aksi
21.	Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE	Bukti dukung terkait setiap indikator telah menggambarkan pelaksanaan aksi sesuai dengan yang ditetapkan dalam rencana aksi
22.	Indeks Perencanaan Pembangunan	Berdasarkan laporan <i>progress</i> rencana aksi, kegiatan penyusunan dokumen penyesuaian Perjanjian Kinerja 2024 belum dilaksanakan karena sampai dengan Triwulan III ini belum ada urgensi untuk melakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja TA 2024

C. KUALITAS MANAJEMEN DALAM PELAKSANAAN RB		
NO.	AKSI	CATATAN
1.	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Belum terdapat pelaksanaan aksi berdasarkan rencana aksi yang dilaksanakan pada Triwulan III
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN: Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan III telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional: Indeks SPBE	Terdapat 4 (empat) dari total 5 (lima) rencana aksi dengan data dukung yang telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi yang sesuai pada setiap indikator <i>output</i> . Namun terdapat 1 (satu) rencana aksi yang belum menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi yaitu "Meningkatkan penetapan manajemen aset TIK".
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi: Nilai SAKIP	Terdapat 4 (empat) dari total 7 (tujuh) rencana aksi dengan data dukung yang telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi yang sesuai pada setiap

		indikator <i>output</i> dan terdapat 3 (tiga) rencana aksi yang ditunda ke Triwulan IV
5.	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja: Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Terdapat 3 (tiga) dari total 4 (empat) rencana aksi dengan data dukung yang telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi yang sesuai pada setiap indikator <i>output</i> dan terdapat 1 (satu) rencana aksi yang ditunda ke Triwulan IV
6.	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Tingkat Maturitas SPIP	Terdapat 2 (dua) dari total 4 (empat) rencana aksi dengan data dukung yang telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi yang sesuai pada setiap indikator <i>output</i>
7.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan III telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
8.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei Penilaian Integritas (SPI)	<p>Terdapat 2 (dua) dari total 4 (empat) rencana aksi dengan lampiran data dukung belum menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi yang sesuai pada setiap indikator <i>output</i> dengan keterangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembinaan kepada vendor/penyedia terkait pengenalan e-katalog sektoral, kewajiban membuat pakta integritas, serta informasi lain terkait pengadaan di Sekretariat Jenderal DPR RI (belum melampirkan data dukung surat himbauan kepada Penyedia/Vendor untuk pembuatan Pakta Integritas dalam setiap kegiatan Pengadaan Barang/Jasa); 2. Mengikutsertakan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dalam pelatihan e-Learning KPK terkait Anti Korupsi dan Integritas (belum melampirkan sertifikat keikutsertaan e-learning Bimbingan teknis Pengendalian Gratifikasi KPK minimal 50% dari jumlah Tim UPG)
9.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan: Indeks Reformasi Hukum	<p>Terdapat 8 (delapan) dari total 9 (sembilan) rencana aksi dengan data dukung yang telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi yang sesuai pada setiap indikator <i>output</i> yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat surat ke Kementerian Hukum dan HAM mengenai indikator penilaian; 2. TOR pelatihan peningkatan kompetensi perancang Peraturan Perundang-undangan;

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Penyusunan Surat Keputusan dan Surat Tugas kegiatan kajian dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau kegiatan pemantauan; 4. Penyusunan laporan hasil kajian dan evaluasi Undang-Undang; 5. Pengiriman rekomendasi hasil kegiatan kajian dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau kegiatan pemantauan pelaksanaan Undang-Undang; 6. Membuat abstrak peraturan yang diunggah ke <i>website</i> JDIH; 7. Mengumpulkan <i>Capture</i> Metadata Pengolahan Dokumen Hukum, URL Integrasi, Log Sinkronisasi Integrasi, Media Sosial; 8. Mengunggah aktivitas pengelolaan dan pengembangan JDIH, serta informasi mengenai JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Media Sosial JDIH (Instagram)
10.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	<p>Terdapat 2 (dua) rencana aksi dengan lampiran data dukung yang telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi yang sesuai pada setiap indikator <i>output</i> yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rekapitulasi Tindak Lanjut 60 (enam puluh) hari LHP BPK; 2. Pemantauan TLHP BPK Semester I 2024.
11.	Pelaksanaan Arsip Digital: Kualitas Pengelolaan Arsip Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip	<p>Terdapat 4 (empat) dari 5 (lima) rencana aksi dengan lampiran data dukung yang belum menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi yang sesuai pada setiap indikator <i>output</i> dengan keterangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan <i>Mobile File (Roll O Pack)</i> (data dukung terlampir belum menggambarkan penjelasan waktu dan tanggal pelaksanaan kegiatan sehingga tidak dapat di analisis kesesuaian pelaksanaan aksi dengan waktu yang sudah direncanakan pada rencana aksi); 2. Sewa Ruang Arsip Satu (data dukung belum dilampirkan); 3. Sewa Ruang Arsip Dua (data dukung belum dilampirkan); 4. Penataan Arsip Bidang Kepegawaian (data dukung terlampir belum

		menggambarkan penjelasan waktu dan tanggal pelaksanaan kegiatan)
12.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa: Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan III telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
13.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan III telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
14.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indeks Pengelolaan Aset	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan III telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Opini BPK	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan III telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
16.	Penguatan Sistem Merit: Indeks Sistem Merit	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan III telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
17.	Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN: Indeks BerAkhlak	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan III telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
18.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral: Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Belum terdapat pelaksanaan aksi berdasarkan rencana aksi yang dilaksanakan pada Triwulan III
19.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Survei Kepuasan Masyarakat	Bukti dukung telah menggambarkan manajemen/pengelolaan kegiatan terkait pelaksanaan aksi secara substansial telah sesuai untuk mencapai <i>output</i> yang ditetapkan dalam rencana aksi
20.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Indeks Pelayanan Publik	<p>Bukti dukung telah menggambarkan manajemen/pengelolaan kegiatan terkait pelaksanaan aksi secara substansial telah sesuai untuk mencapai <i>output</i> yang ditetapkan dalam rencana aksi.</p> <p>Untuk saat ini pelaksanaan PEKPPP Instansional masih dalam tahap persiapan karena memprioritaskan penilaian PEKPPP Nasional, sehingga bukti dukung yang dilampirkan masih berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data PIC; • LKE PEKPPP;

		<ul style="list-style-type: none"> • Paparan dan undangan sosialisasi PEKPPP; • Pedoman pengisian
21.	Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE	Bukti dukung telah menggambarkan manajemen/pengelolaan kegiatan terkait pelaksanaan aksi secara substansial telah sesuai untuk mencapai <i>output</i> yang ditetapkan dalam rencana aksi
22.	Indeks Perencanaan Pembangunan	Kegiatan penyusunan dokumen penyesuaian Perjanjian Kinerja 2024 belum dilaksanakan karena sampai dengan Triwulan III ini belum ada urgensi untuk melakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja TA 2024

II. TINDAK LANJUT ATAS HASIL REKOMENDASI LAPORAN PERIODE SEBELUMNYA

NO.	AKSI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional: Indeks SPBE	Agar pada Laporan <i>Progress</i> "Indeks SPBE" dapat memberikan penjelasan terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator dan memberikan penjelasan terkait penggunaan anggaran yang dilakukan untuk mencapai <i>output</i> kegiatannya	Akan diberikan penjeleasan penggunaan anggaran di laporan <i>progress</i> yang dibuat
2.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Opini BPK	Agar dapat melampirkan bukti dukung indikator <i>output</i> aksi "Rekonsiliasi Eksternal Piutang atas Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai" secara tepat waktu	Bukti dukung belum dilampirkan dalam folder yang telah disiapkan
3.	Indeks Sistem Merit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar melampirkan laporan <i>progress</i> ketercapaian <i>output</i> Triwulan II; 2. Agar melampirkan bukti dukung indikator "Laporan Pelaksanaan Pelatihan Per Triwulan" tepat waktu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah melampirkan laporan <i>progress</i> ketercapaian <i>output</i> Triwulan II, namun belum ditandatangani; 2. Telah terlampir bukti dukung terkait indikator <i>output</i> aksi "Laporan pelaksanaan

			pelatihan per triwulan" untuk Triwulan I
4.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Survei Kepuasan Masyarakat	Agar dapat melampirkan laporan <i>progress</i> ketercapaian <i>output</i> Triwulan II dan bukti dukung untuk setiap indikator <i>output</i> aksi secara tepat waktu	Pelaksanaan aksi Triwulan II telah dijabarkan juga dalam Laporan <i>Progress</i> Rencana Aksi Triwulan III, namun bukti dukung belum dilampirkan dalam folder yang telah disiapkan
5.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Indeks Pelayanan Publik	Agar dapat melampirkan laporan <i>progress</i> ketercapaian <i>output</i> Triwulan II dan bukti dukung untuk setiap indikator <i>output</i> aksi secara tepat waktu	Pelaksanaan aksi Triwulan II telah dijabarkan juga dalam Laporan <i>progress</i> Rencana Aksi Triwulan III, namun bukti dukung belum dilampirkan dalam folder yang telah disiapkan
6.	Indeks Perencanaan Pembangunan	Agar dapat melampirkan laporan <i>progress</i> ketercapaian <i>output</i> Triwulan II dan bukti dukung untuk setiap indikator <i>output</i> aksi	Pelaksanaan aksi Triwulan II telah dijabarkan juga dalam Laporan <i>progress</i> Rencana Aksi Triwulan III, namun bukti dukung belum dilampirkan dalam folder yang telah disiapkan

III. REKOMENDASI

Berdasarkan atas catatan pelaksanaan Rencana Aksi RB Sekretariat Jenderal DPR RI di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti. Rincian penjelasan atas rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

NO.	AKSI	REKOMENDASI
1.	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Agar dapat melampirkan laporan <i>progress</i> ketercapaian <i>output</i> Triwulan III yang sudah diformalkan (ditandatangani)
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN: Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	Agar dapat melampirkan laporan <i>progress</i> ketercapaian <i>output</i> Triwulan III yang sudah diformalkan (ditandatangani)

3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional: Indeks SPBE	Agar memberikan penjelasan penggunaan anggaran di laporan <i>progress</i> yang dibuat
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi: Nilai SAKIP	Agar kegiatan aksi “Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat jenderal DPR RI Tahun 2025”, “Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja”, dan “Tersusunnya laporan evaluasi kinerja triwulan tahun 2024” dilaksanakan di Triwulan IV
5.	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja: Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Agar kegiatan aksi proses evaluasi oleh TPN dilaksanakan di Triwulan IV
6.	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Tingkat Maturitas SPIP	Agar kegiatan aksi “Melakukan analisis risiko terkait dengan risiko korupsi pada kegiatan utama yang menghasilkan peta risiko korupsi dan rencana tindak pengendalian yang terjadwal” dan “Analisis risiko digunakan sebagai dasar bahan penyusunan rencana tindak pengendalian dan secara berkala mendokumentasikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana tindak pengendalian dengan baik” dilaksanakan di Triwulan IV
7.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	-
8.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei Penilaian Integritas (SPI)	<ul style="list-style-type: none"> • Agar memperhatikan target waktu penyelesaian dalam merealisasikan rencana aksi; • Agar melengkapi data dukung sesuai dengan indikator <i>output</i> yang telah dicantumkan dalam rencana aksi yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melampirkan surat himbauan kepada Penyedia/Vendor untuk pembuatan Pakta Integritas dalam setiap kegiatan Pengadaan Barang/Jasa; 2. Melengkapi lampiran sertifikat keikutsertaan e-learning Bimbingan teknis Pengendalian Gratifikasi KPK minimal 50% dari jumlah Tim UPG
9.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan: Indeks Reformasi Hukum	Agar melampirkan data dukung bahwa abstrak telah diunggah ke <i>website</i> JDIH
10.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Agar kegiatan Pemantauan TLHP BPK Semester II 2024 dilaksanakan pada Triwulan IV

11.	Pelaksanaan Arsip Digital: Kualitas Pengelolaan Arsip Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip	<ul style="list-style-type: none"> Agar melengkapi tanggal pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dianalisis kesesuaian pelaksanaan aksi dengan waktu yang telah ditetapkan pada rencana aksi untuk data dukung berikut: <ol style="list-style-type: none"> Dokumentasi pelaksanaan kegiatan “Pemeliharaan <i>Mobile File (Roll O Pack)</i>”; Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Penataan Arsip Bidang Kepegawaian Agar melengkapi data dukung sesuai dengan indikator <i>output</i> yang telah dicantumkan dalam rencana aksi: <ol style="list-style-type: none"> Sewa Ruang Arsip Satu; Sewa Ruang Arsip Dua
12.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa: Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	-
13.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	-
14.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indeks Pengelolaan Aset	-
15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Opini BPK	-
16.	Penguatan Sistem Merit: Indeks Sistem Merit	-
17.	Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN: Indeks BerAkhlak	Agar dapat melampirkan laporan <i>progress</i> ketercapaian <i>output</i> Triwulan II yang sudah diformalkan (ditandatangani)
18.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral: Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	-
19.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Survei Kepuasan Masyarakat	<p>Melampirkan rencana aksi yang telah disesuaikan kembali pada folder yang telah disiapkan oleh Bagian PKORB http://bit.ly/EvidenRenaksiRBTWI</p> <p>Melampirkan bukti dukung ke folder yang telah disiapkan oleh Bagian PKORB http://bit.ly/EvidenRenaksiRBTWI</p>
20.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Indeks Pelayanan Publik	<p>Memformalkan revisi Rencana Aksi terbaru. Memformalkan Laporan <i>Progress</i> Rencana Aksi Triwulan III.</p> <p>Melampirkan bukti dukung ke folder yang telah disiapkan oleh Bagian PKORB http://bit.ly/EvidenRenaksiRBTWI</p>

21.	Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE	-
22.	Indeks Perencanaan Pembangunan	Memformalkan Laporan <i>Progress</i> Rencana Aksi Triwulan III

..